

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada era modern seperti saat ini pengembangan kota yang semakin pesat menjadi fenomena yang tidak terhindarkan. Pengembangan ini terjadi seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi di kota-kota Indonesia yang membuatnya bertransformasi menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini menghasilkan penghidupan perkotaan yang dinamis dengan turut diiringi oleh tantangan dalam pengelolaan ruang kota. Pemanfaatan ruang kota yang lestari, optimal, dan seimbang menjadi krusial untuk diciptakan demi terwujudnya lingkungan perkotaan yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, perencanaan yang matang tentunya diperlukan, dan salah satu instrumen yang digunakan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). RTRWK ini merupakan panduan bagi setiap daerah di Indonesia dalam mengatur penggunaan lahan dan ruang kota yang dimilikinya, termasuk dalam hal ini adalah aspek pemukiman, fasilitas umum, dan juga ruang terbuka (*open space*).

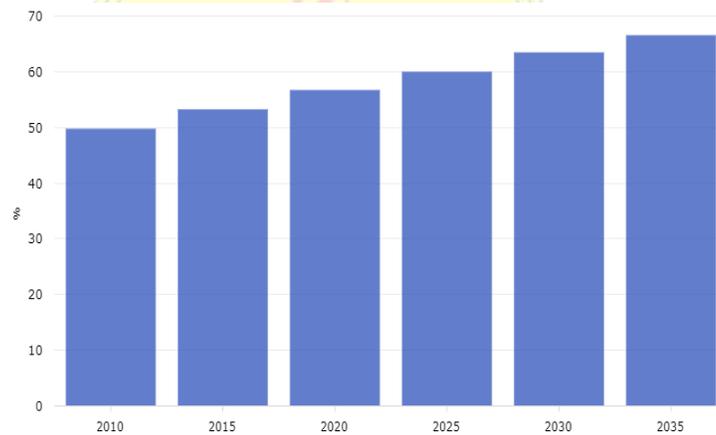
Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk perkotaan juga turut menekan pemanfaatan ruang yang ada. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, sebanyak 56,7% penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan, diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 66,6% pada 2035.<sup>1</sup> Data lain menunjukkan jika pada tahun 2020 penduduk perkotaan di Indonesia yang diproyeksikan sebanyak 154,2 juta jiwa atau 56,4% dari total penduduk, akan mengalami peningkatan hingga 27,4 juta jiwa atau 59,3% pada tahun

---

<sup>1</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Indonesia (2010-2035)", *Databoks* diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/18/sebanyak-567-penduduk-indonesia-tinggal-di-perkotaan-pada-2020> pada 21 Desember 2023 pukul 08.57.

2025.<sup>2</sup> Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini membawa konsekuensi yang signifikan terhadap pengelolaan ruang kota. Semakin padat populasi yang ada pada kawasan perkotaan menimbulkan tingginya permintaan akan lahan yang berdampak pada peningkatan tekanan terhadap ruang. Permintaan akan hunian, fasilitas umum, dan juga ruang terbuka publik (*open space*) menjadi tantangan utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan ruang perkotaan yang dinamis seperti saat ini.

**Gambar 1.1 Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Indonesia**



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/18/sebanyak-567-penduduk-indonesia-tinggal-di-perkotaan-pada-2020> (2023)

Pertumbuhan penduduk perkotaan dalam hal ini juga turut mempengaruhi kebutuhan dan juga perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan keberadaan ruang publik. Penyediaan ruang publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi penting untuk mendukung pengembangan kota yang lebih berkualitas.<sup>3</sup> Salah satu ruang terbuka yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kehadiran RTH tidak terbatas

<sup>2</sup> Dwi Hadya Jayani, "Jumlah Penduduk Indonesia, Kota dan Persentase Penduduk Kota terhadap Jumlah Penduduk Indonesia 2015-2025", *Databoks* diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/berapa-jumlah-penduduk-perkotaan-di-indonesia> pada 21 Desember 2023 pukul 09.00.

<sup>3</sup> Edi Purwanto, "Fungsi Laten Ruang Jalan Malioboro Jogjakarta", *Jurnal Arsitektur, Sains, Kota Pemukiman dan Lingkungan* 2008, hlm. 27-28.

pada bidang estetika ataupun penghijauan semata, tetapi dalam hal ini juga turut membawa peranan penting dengan berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan kelestarian lingkungan. Dampak positif lainnya dari adanya RTH ini juga turut dirasakan oleh kesehatan masyarakat yang menggunakannya. Sebagai contoh dapat adanya peningkatan kualitas udara, mengurangi rasa stress, dan juga dapat memberikan akses bagi mereka untuk berolahraga.<sup>4</sup>

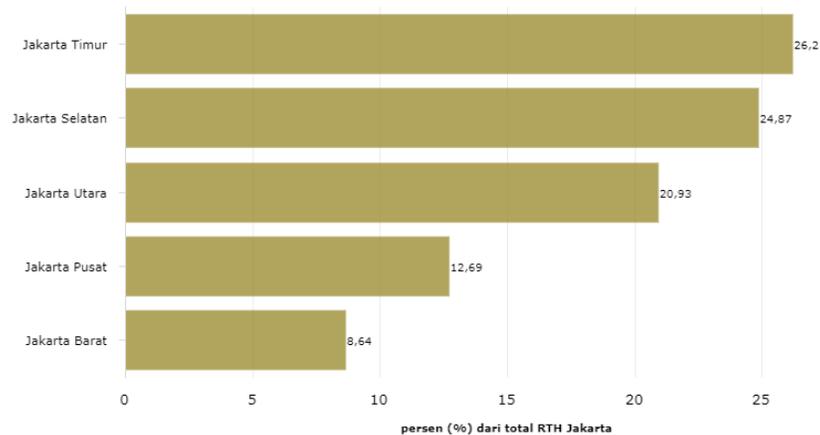
DKI Jakarta yang merupakan provinsi dengan luas wilayah sekitar 664,01 km<sup>2</sup>, dengan penduduk berjumlah 11.240.000 jiwa pada tahun 2023, juga turut merasakan adanya keterbatasan akan lahan ini. Setidaknya hanya sekitar 33,34 juta m<sup>2</sup> atau sekitar 5,2% luas ruang yang diperuntukkan sebagai RTH di wilayah Ibu Kota.<sup>5</sup> Jakarta Timur memimpin menjadi kota dengan RTH terluas, yakni sebesar 26,2% dari total luas RTH DKI Jakarta. Lalu disusul oleh Jakarta Selatan dengan besaran 24,87%. Jakarta Utara yang dalam hal ini menjadi wilayah administrasi dari penelitian ini berada pada peringkat ketiga dengan besaran sekitar 20,93% dari total RTH di Jakarta. Jumlah ini tentunya belum memenuhi standar ideal proporsi RTH wilayah kota dalam UU No. 26 Tahun 2007, yakni 30% dari luas kota dengan rincian 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

---

<sup>4</sup> Prima Suci Anggraeni, Skripsi: “Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015” (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm. 24-27.

<sup>5</sup> Erlina F Santika, “Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau/RTH Kota Administrasi DKI Jakarta (2023)”, *Databoks* diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/14/ruang-terbuka-hijau-jakarta-hanya-52-pada-2023-ini-luas-per-kotanya> pada 21 Desember 2023 pukul 10.30.

**Gambar 1.2 Persentase Luas RTH Kota Administrasi DKI**



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/14/ruang-terbuka-hijau-jakarta-hanya-52-pada-2023-ini-luas-per-kotanya> (2023)

Keputusan pemilihan wilayah kota administrasi Jakarta Utara sebagai lokasi penelitian adalah karena karakteristik dari wilayah ini yang berbatasan langsung dengan Teluk Jakarta. Karakteristik wilayah yang demikian, turut berdampak pada karakteristik masyarakat yang dimiliki oleh wilayah utara Jakarta ini. Masyarakat di sini memiliki potensi yang besar dalam pembauran dengan masyarakat yang tidak hanya berasal dari wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga dari daerah wilayah luar DKI Jakarta yang berasal dari kedatangan mereka melalui Teluk Jakarta. Hal ini berdampak pada besarnya potensi keberagaman karakteristik masyarakat yang dimiliki oleh wilayah ini. Tidak hanya berdasar pada hal tersebut, RTH Kalijodo yang merupakan salah satu RTH yang dimiliki oleh wilayah kota Jakarta Utara, secara khusus difokuskan karena adanya keunikan dari ruang terbuka ini. Ruang yang terletak pada kawasan yang dulunya terkenal akan sejarah kelamnya yang kontroversial, kini telah mengalami transformasi yang tidak hanya secara fisik, tetapi juga fungsi akan keberadaannya. Perubahan fungsi ini pada fokusnya tidak hanya dipengaruhi berdasarkan sejarah yang dialami oleh kawasan ini, tetapi juga karakteristik dari pengguna ruang ini sendiri. Dengan demikian,

wilayah kota Jakarta Utara yang meskipun berada pada peringkat ketiga dari total RTH yang dimiliki oleh DKI Jakarta, tetapi merupakan wilayah kota dengan ruang terbuka (RTH Kalijodo) dan juga keberagaman karakteristik masyarakat yang dibutuhkan dalam fokus penelitian yang menekankan adanya keberagaman fungsi dari suatu ruang terbuka hijau di perkotaan.

Urgensi tinggi akan keberadaan RTH ini juga turut dituangkan dalam Peraturan Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH pada kawasan perkotaan. Salah satu poin menarik dalam peraturan ini adalah adanya ketentuan bagi setiap 25 penduduk, seharusnya terdapat 250 m<sup>2</sup> ruang terbuka. Namun, kenyataannya, kuantitas ruang publik seperti yang telah dipaparkan sebelumnya masih belum mencapai luas ideal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Faktor-faktor tambahan seperti adanya tekanan urbanisasi, pembangunan yang kurang terencana, dan juga kebutuhan ruang yang terus meningkat, turut memperbesar kesulitan bagi suatu kota untuk menghadapi tantangan dalam memenuhi standar ini. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan pula jika tidak hanya belum memenuhi standar kuantitas, kualitas dari suatu ruang publik yang telah ada pun belum terbukti kebermanfaatannya. Maka dari itu, menjadi penting bagi kita untuk melihat jika suatu pengembangan ruang publik tidak hanya terlihat dari kuantitas, tetapi juga kualitas yang mampu memberikan kenyamanan dan memenuhi kebutuhan penggunanya.

Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan kota dengan predikat penyumbang luas RTH ketiga di DKI Jakarta, juga turut berupaya untuk memenuhi standar kuantitas dan kualitas dari suatu ruang publik di Jakarta. Salah satunya adalah dengan adanya keberadaan RTH Kalijodo dalam wilayah administratifnya. Kawasan Kalijodo yang dulunya terkenal akan “dunia malam”-nya yang kontroversial, kini telah bertransformasi menjadi ruang terbuka publik. Beragam permasalahan sosial yang muncul akibat dari gemerlap dunia malam ini, pada akhirnya menyadarkan pemerintah kota untuk

melakukan peninjauan ulang mengenai peruntukkan ruang kota.<sup>6</sup> Pembongkaran pada akhirnya dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah tegas dalam mengubah kawasan yang sebelumnya problematis ini menjadi salah satu aset ruang publik kota di Jakarta.

Transformasi kawasan Kalijodo tidak hanya menciptakan perubahan fisik yang signifikan bagi dirinya, tetapi juga merubah fungsinya secara substansial dari masa ke masa. Pada awalnya, kawasan ini digunakan sebagai tempat diselenggarakannya festival *Peh Cun* yang menjadi wadah bagi para keturunan Tionghoa yang ingin mencari hiburan sekaligus jodoh.<sup>7</sup> Pada masa berikutnya, kawasan ini mulai bergeser peruntukkannya sebagai tempat prostitusi. Peruntukkan yang demikian mulai menimbulkan banyak permasalahan sosial lain di kawasan ini, mulai dari perjudian hingga premanisme sudah tidak asing lagi untuk ditemukan pada masa itu.<sup>8</sup> Melihat hal tersebut, Pemerintah DKI Jakarta berusaha untuk mengubah peruntukkan ruang yang negatif tersebut sebagai ruang terbuka publik. Pembongkaran pun dilakukan dengan banyaknya protes yang diajukan oleh penduduk sekitar kawasan Kalijodo. Setelah dianggap “bersih” dari memori kelamnya, kawasan Kalijodo mulai dibangun kembali dengan peruntukkan ruangnya yang baru, yakni sebagai ruang publik kota.

Tidak terbatas pada perubahan fungsi berdasarkan transformasi kawasannya dari masa ke masa, perubahan fungsi ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan yang berkembang dari masyarakat akan ruang publik yang inklusif dan beragam. Ruang publik Kalijodo berusaha untuk mewadahi segala

---

<sup>6</sup> Mei Amelia, “Begini Awal Mula Munculnya Prostitusi, Judi, dan Premanisme Kalijodo”, *DetikNews* diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3140495/begini-awal-mula-munculnya-prostitusi-judi-dan-premanisme-di-kalijodo> pada 21 Desember 2023 pukul 15.35.

<sup>7</sup> Remy Sylado, *Ca Bau Kan: Hanya Sebuah Dosa*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm. 156.

<sup>8</sup> Mei Amelia, *loc. cit.*

kebutuhan dari penggunaannya dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang beragam. Kalijodo berkembang menjadi kawasan multifungsi dengan keberadaan dirinya yang memiliki dua macam fasilitas ruang publik yang berbeda, yakni Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). RPTRA yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas bagi anak-anak, dilengkapi dengan RTH sebagai ruang hijau dengan beragam zona yang siap untuk mawadahi keberagaman kebutuhan penggunaannya, menjadikan kawasan Kalijodo kembali ramai dengan daya pikat yang baru. Kalijodo berupaya untuk membangun kembali identitas dirinya dengan bertransformasi menjadi ruang publik serbaguna yang memberikan pilihan fasilitas yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penggunaannya.

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik pada topik pembahasan ini karena ingin mengidentifikasi keberagaman fungsi sosial ruang terbuka hijau di perkotaan, khususnya pada RTH Kalijodo, Jakarta Utara. Fokus penelitian ini menjadi menarik untuk dikaji karena adanya transformasi, tidak hanya fisik, tetapi juga fungsi yang dialami oleh kawasan Kalijodo, dari yang awalnya kontraversial karena identitas negatifnya, kini menjadi kawasan yang memberikan manfaat beragam bagi publik. Melalui identifikasi fungsi ruang publik di RTH Kalijodo, peneliti diharapkan dapat mengeksplorasi potensi ruang publik dalam memenuhi keberagaman kebutuhan penggunaannya. Wawasan mendalam tentang bagaimana ruang publik kota dapat beradaptasi dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat akan peruntukkan ruang yang beragam. Melalui penelitian ini, diharapkan pandangan baru akan perencanaan dan pengembangan ruang publik kota menjadi lebih berdaya guna dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

## 1.2. Permasalahan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kawasan Kalijodo yang telah bertransformasi, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara fungsi telah dipengaruhi oleh keberagaman karakteristik masyarakat akan peruntukkan ruang. Hal ini menuntut ruang publik di Kalijodo, salah satunya fasilitas RTH yang dimilikinya untuk dapat memwadahi keberagaman tersebut dengan memiliki fungsi yang disediakan dari beberapa fasilitas dan layanannya. Berdasarkan uraian permasalahan penelitian tersebut, maka permasalahan penelitian yang peneliti angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik pengguna RTH Kalijodo dalam struktur sosial masyarakat?
2. Bagaimana pembagian ruang berbasis zonasi di RTH Kalijodo?
3. Bagaimana implikasi adaptasi anomi fungsi terhadap keberagaman fungsi sosial di RTH Kalijodo?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dijabarkan, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan berikut:

1. Mendeskripsikan karakteristik pengguna RTH Kalijodo dalam struktur sosial masyarakat
2. Mendeskripsikan pembagian ruang berbasis zonasi di RTH Kalijodo
3. Mendeskripsikan implikasi adaptasi anomi fungsi terhadap keberagaman fungsi sosial di RTH Kalijodo

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

##### **1. Manfaat Akademis**

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka untuk pengembangan ilmu sosiologi, khususnya dalam memperdalam pemahaman mengenai fungsi ruang terbuka hijau di perkotaan dari perspektif kajian sosiologi perkotaan
- b. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik sama, yakni terkait dengan fungsi dalam ruang terbuka hijau di perkotaan, sebagai bahan kajian pustaka dalam penyusunan penelitian
- c. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pembaca mengenai keberagaman fungsi yang ada pada ruang terbuka hijau di perkotaan, mulai dari fungsi yang memang direncanakan peruntukkannya (manifes) hingga fungsi yang muncul tanpa direncanakan dan harus diadaptasi keberadaannya (laten)

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dari hasil penelitian mengenai fungsi ruang terbuka hijau di perkotaan ini peneliti berharap dapat memberikan masukan kepada perancang ruang terbuka kota untuk dapat merancang perencanaan pengembangan ruang terbuka hijau yang lebih berdaya guna dan responsif terhadap keberagaman masyarakat. Hal ini tidak lain adalah agar ruang publik dapat berfungsi secara optimal dalam memenuhi kebutuhan dan preferensi para penggunanya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai peran mereka

dalam membentuk keberagaman fungsi ruang terbuka hijau di perkotaan. Dorongan akan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait ruang publik kota menjadi tujuan yang tidak dapat dipisahkan dari manfaat dalam melakukan penelitian ini.

### **1.5. Tinjauan Penelitian Sejenis**

Penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan sejumlah bahan literatur yang relevan dan juga kredibel untuk mendukung pembahasannya. Total jumlah literatur yang peneliti gunakan adalah 21 bahan, yang terdiri dari 8 jurnal nasional, 3 jurnal internasional, 3 tesis, dan juga 7 buku, baik cetak maupun digital (*e-book*). Pemilihan bahan literatur ini dilakukan oleh peneliti secara selektif dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti keterkaitan dengan topik yang akan diteliti, kebaruan informasi, dan juga standar dari sumber bahan literatur.

Studi literatur sejenis dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan topik yang akan diteliti. Dengan menganalisis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, peneliti setidaknya dapat mengidentifikasi permasalahan yang masih perlu dijawab, teori yang relevan, dan peluang untuk memberikan kontribusi baru dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan melakukan studi literatur terkait dengan fungsi ruang terbuka hijau di perkotaan. Pembahasan mengenai hasil studi literatur yang dilakukan oleh peneliti akan dijelaskan pada paragraf berikutnya.

Untuk meneliti adanya keberagaman fungsi yang mungkin muncul dalam pengembangan kawasan Kalijodo sebagai RTH, kita perlu terlebih dahulu mengetahui keberadaan RTH itu sendiri dalam suatu struktur ruang

kota. Menurut buku berjudul “Fenomena Urban Sprawl Jabodetabek” karya Juhadi, Dkk, dijelaskan jika struktur ruang kota memiliki beberapa zona utama jika dilihat dari pandangan Ernest W. Burgess, yakni *Central Business District* (CBD), Zona Peralihan (ZPN), Zona Perumahan Pekerja yang Bebas (ZPBB), Zona Pemukiman yang Lebih Baik (ZPB), dan juga Zona Penglaju.<sup>9</sup> Pembagian wilayah kota secara konsentris oleh Burgess ini mendapat banyak kritikan karena pertumbuhan kota yang dianggap lebih terlihat kompleks dibandingkan dengan pola sederhana yang demikian.<sup>10</sup>

Untuk menanggapi pola pertumbuhan kota yang sederhana tersebut, penulis juga menggunakan bahan literatur kota lainnya, yakni dari buku berjudul “Migration Within Cities: A Study of Socio-economic Processes, Intra-city Migration, and Grass-roots Politics in Jakarta”, karya Gumilar R. Somantri. Dalam buku ini dijelaskan secara spesifik tentang kota Jakarta yang dianggap memiliki model perkotaan dengan pusat kota yang dimodifikasi. Pusat tersebut terbagi atas beberapa bagian, yakni pusat inti, pusat sekunder, dan pusat tersier.<sup>11</sup> Ketiga jenis pusat ini memiliki karakteristiknya masing-masing yang didasarkan pada perkembangan sejarah Jakarta dan juga perbandingan antara pusat kota utama dengan pusat-pusat kota lain yang mengelilinginya. Literatur mengenai struktur kota ini menjadi penting untuk mengidentifikasi keberadaan RTH sebagai salah satu fasilitas publik yang dimiliki oleh kota.

Selanjutnya, pemabahasan kedua yang tidak kalah penting adalah tentang RTH itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

---

<sup>9</sup> Ernest W. Burgess, *The Growth of the city*, in R.E.Park; E.W Burgess and R.D McKenzie, *The City*, (Chicago: University of Chicago Press, 1925). hlm. 50-58.

<sup>10</sup> Gumilar R. Somantri, *Migration Within Cities: A Study of Socio-economic Processes, Intra-city Migration, and Grass-roots Politics in Jakarta*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia, 2007), hlm. 22.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 80-89.

5 tahun 2008, RTH kota didefinisikan sebagai lahan terbuka pada area perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi untuk mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut, seperti keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan.<sup>12</sup> RTH Kalijodo yang menjadi lokasi dari penelitian yang akan dilakukan, akan lebih mudah penganalisaannya dengan menggunakan acuan dasar terkait RTH dari buku karya Joga dan Ismaun yang berjudul “RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau”. Dalam buku ini dijelaskan mengenai tipologi pembagian RTH ke dalam 4 aspek, yakni fisik, fungsi, struktur, dan juga kepemilikan.<sup>13</sup> Dari sisi fisik, RTH dapat dikelompokkan atas dua hal, yakni RTH alami dan RTH Non Alami. Dari sisi fungsinya, menurut buku ini RTH dapat dikelompokkan atas 4 fungsi, yakni ekologi, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Dari sisi struktur, RTH dapat dikelompokkan atas dua hal, yakni pola ekologis dan pola planologis. Dan terakhir dilihat dari sisi kepemilikan, RTH pun dikelompokkan atas dua jenis, yakni RTH publik dan RTH privat.

Fungsi RTH sebagai ruang terbuka (publik) setidaknya dapat diidentifikasi atas 4 aspek, yakni ekologis, estetika, ekonomi, dan sosial.<sup>14</sup> Keempat aspek sebagaimana yang dijelaskan dalam Tesis berjudul “Kajian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Kanal Banjir Timur Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur”, merupakan fungsi utama dari keberadaannya di mata penggunaannya. Dari penelitian ini kita dapat melihat perbedaan fungsi RTH jika ditinjau dari keempat aspek itu, Dari sisi ekologis, RTH publik berfungsi sebagai pengendali banjir. Dari sisi estetika, kawasan RTH publik menjadikan kawasan Kanal Banjir Timur (KBT) lebih asri dan

---

<sup>12</sup> Cori Mentari Tambunan, Skripsi: “Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok” (Depok: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 19.

<sup>13</sup> Joga dan Ismaun, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 32-94.

<sup>14</sup> Henni Septa, Tesis: “Kajian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Kanal Banjir Timur Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur (Depok: Universitas Indonesia, 2017), hlm. 112.

hijau. Dari sisi ekonomi, RTH di kawasan KBT dimanfaatkan sebagai kebun sayuran. Sedangkan dari sisi sosial, kawasan RTH publik berupa jalan inspeksi dan taman yang dimanfaatkan sebagai ruang publik bagi masyarakat, yaitu untuk rekreasi dan olahraga. Dalam penelitian ini juga dijelaskan tentang kriteria RTH dengan predikat ruang terbuka yang baik, yakni harus memiliki nilai *responsive*, *democratif*, dan *meaningfull*.<sup>15</sup>

Dikarenakan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada fungsi dari kawasan Kalijodo sebagai RTH, maka pola interaksi antara manusia dengan alam maupun manusia dengan manusia lainnya menjadi penting. Studi ini dapat terlihat dari salah satu Jurnal Internasional yang dijadikan sebagai bahan rujukan yakni dengan judul “Human Interaction in Open Space”. Dalam Jurnal Internasional karya Dasimah binti Omar, dkk, ini dijelaskan jika pola interaksi manusia dengan alam dan manusia dengan manusia sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pola interaksi tersebut dijelaskan dalam penelitian ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi manusia dengan alam adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku individu terhadap lingkungan.<sup>16</sup> Tidak terbatas pada hal tersebut, faktor sosial dan juga budaya dalam berinteraksi dengan alam, turut memainkan peranan penting dalam pola interaksi ini. Di sisi lain, pola interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan ini turut dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya mereka dalam berinteraksi satu sama lain.<sup>17</sup>

Pola interaksi yang turut mempengaruhi keberadaan fungsi dari suatu RTH merupakan hal yang turut dipengaruhi oleh karakteristik dari pengguna itu sendiri. Apabila karakteristik yang melatarbelakangi mereka, seperti usia,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>16</sup> Dasimah binti Omar, dkk, “Human Interaction in Open Spaces”, *Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015*, hlm. 356-357.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 358.

jenis kelamin, tingkat ekonomi dan lain sebagainya tidak membatasi mereka, maka kemungkinan untuk mewujudkan fungsi normatif dari suatu RTH menjadi lebih mudah. Akan tetapi, apabila karakteristik mereka membatasi, maka hasil dari upaya perwujudan tersebut akan mengalami suatu keadaan yang disebut anomie (penyimpangan). Istilah ini dipakai oleh Robert K. Merton untuk menjelaskan ketidakmampuan yang dialami seseorang untuk bertindak menurut nilai-nilai normatif yang dimilikinya karena posisi mereka di dalam suatu struktur sosial.<sup>18</sup> Untuk melengkapi pemikirannya ini, Merton juga menjelaskan tentang tipe-tipe adaptasi yang dilakukan oleh seorang individu dalam menghadapi anomie ini. Beliau ingin menekankan dengan jelas mengenai bagaimana struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku yang konformis, tetapi juga menghasilkan perilaku yang menyimpang. Lima (5) tipe adaptasi yang dilakukan oleh seorang individu untuk menghadapi penyimpangan tersebut menurut Merton, yaitu konformitas, ritualisme, inovasi, retreatisme, dan *rebellion* (pembangkangan).

Kelima tipe adaptasi ini dijelaskan secara rinci dalam beberapa literatur, yakni dalam buku karya Ibnu Syamsi (“Sosiologi Deviasi: Sebuah kajian dari Sudut Pandang Pendidikan, Sosiologi, dan Filsafat”), Emilia Susanti dan Eko Rahardjo (“Buku Ajar Hukum dan Kriminologi), serta Aroma Elmina M (“Kriminologi Sebuah Pengantar”). Tidak hanya buku, penjelasan tentang karakter kelima tipe adaptasi tersebut beserta implikasinya juga turut dijelaskan dalam beberapa jurnal, yakni pada jurnal dengan judul “Adaptasi Sosial Warga Kedungharjo Golongan NU di Tempat Relokasi Warga Muhammadiyah Sebagai Dampak Pembangunan Proyek Jalan Tol Solo-Ngawi”, karya Atika Yulianti, Dkk dan juga pada jurnal dengan judul “Adaptasi Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pembangunan Pariwisata Di Desa Sembalun Bumbung

---

<sup>18</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 142-143.

Kecamatan Sembalun”, karya Pratiwi. Testi internasional pun tidak ketinggalan untuk menjelaskan tentang kelima tipe adaptasi ini, yakni pada tesis dengan judul “Deviant Society: The Self-Reliant "Other" in Transcendental America “, karya Ashna Bhagwanani. Beragam literatur yang menjelaskan tentang konsep adaptasi sosial dari Merton ini menjadi penting mengingat konsep ini juga turut digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini. Meskipun penulis mengalami keterbatasan karena tidak adanya literatur yang secara gamblang menjadikan RTH sebagai objek penelitian dari adaptasi sosial ini, tetapi penulis setidaknya dapat mengadopsi konsep tersebut dengan melihat analisa dari beberapa kasus dengan konsep yang sama.

Dari beberapa adaptasi ini, penulis menghubungkannya dengan pemikiran Merton yang lain, yakni konsep struktural fungsional yang dimilikinya. Dengan mengacu pada beberapa buku karya George Ritzer dan Douglas J. Goodman, dari terbitan tahun 2010, 2012, dan juga 2014 dan juga Robert K. Merton dengan judul “Social Theory and Social Structure”, penelitian ini akan didasarkan. Keempat buku ini akan memaparkan tentang fokus analisis Merton yang memusatkannya pada fungsi yang didefinisikannya sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati dan menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu.<sup>19</sup> Fungsi dalam pandangan Merton sendiri dibagi atas dua hal, yakni fungsi manifes dan laten. Dalam hal ini, Merton lebih sering menggunakan kata *intended* (direncanakan) dan *unintended* (tidak direncanakan) untuk menunjukkan fungsi manifes dan laten. Konsep fungsi dan disfungsi berkaitan dengan akibat atau konsekuensi dari sesuatu. Konsekuensi itu dapat berupa sesuatu yang telah diantisipasi atau direncanakan (*anticipated consequences*), dan tidak diantisipasi atau direncanakan (*unanticipated consequences*).<sup>20</sup> Tidak hanya konsepsi tentang

---

<sup>19</sup> Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, (New York: Free Press, 1968), hlm. 105.

<sup>20</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *op.cit.*, hlm. 253.

fungsi manifes dan laten, aspek disfungsi dan non fungsi yang terjadi dari keberadaan suatu ruang terbuka juga dijadikan tinjauan penelitian sejenis yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Beberapa literatur dengan contoh pengimplementasian konsep tersebut dalam beberapa ruang publik, meskipun bukan RTH ditunjukkan dalam beberapa Jurnal Nasional, yaitu jurnal berjudul “Pemanfaatan Ruang Baca Labor Sosiologi FIS UNP Universitas Negeri Padang”, karya Rina Agustina, Dkk, jurnal dengan judul “Fungsi Lain Masjid Raya Sumatera Barat Bagi Remaja di Kota Padang”, karya Arif Zulfian A, jurnal karya Niken dan Nora dengan judul “Fungsi Selasar Akademik di Gedung *Integrated Classroom* Universitas Negeri Padang”, dan juga jurnal berjudul “Fungsi Ruang Publik Pakter Tuak di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat” karya Lucy dan Eka. Keempat jurnal ini memberikan penjelasan tentang penganalisaan konsep struktural fungsi Merton pada beberapa ruang publik.

Tidak terbatas pada hal tersebut, fungsi sosial dari suatu ruang publik secara umum juga dijelaskan dalam beberapa jurnal, diantaranya jurnal dengan judul “Transformasi Fungsi Ruang Terbuka Publik Di Perkotaan Studi Kasus: Taman Pedestrian Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur”, karya Yulia Pratiwi. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang tranformasi kawasan yang turut mempengaruhi fungsi sosial dari suatu ruang. Hal ini tentunya menjadi acuan penting dalam peelitian ini yang menjadikan kawasan Kalijodo dengan sejarah panjang yang turut membentuknya hingga saat ini. Selanjutnya, jurnal dengan judul “Kajian Fungsi Sosial Terhadap Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang”, karya Bramantya W. Jatmiko juga dijadikan sebagai acuan dalam melihat fungsi sosial khususnya yang ada pada RTH atau taman kota.

Dari keberagaman fungsi yang ada di suatu ruang publik, khususnya pada RTH yang menjadi fokus dari penelitian ini, penulis juga berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dengan juga melihat dampak dari fungsi RTH itu sendiri dalam beberapa literatur. Seperti halnya yang terdapat dalam Jurnal Internasional karya Ayah Abbasi, dkk yang berjudul “Open Space Quality in Deprived Urban Areas: User Perspective an Use Pattern”. Dalam jurnal ini didapatkan hasil jika keberadaan RTH yang penting bagi masyarakat, tidak secara otomatis memiliki kualitas fasilitas dan layanan yang terbaik.<sup>21</sup> Penelitian yang menjadikan RTH di kawasan Edinburgh sebagai lokasi penelitiannya ini digambarkan tidak sesuai jika belum memenuhi kebutuhan dan harapan penggunanya.<sup>22</sup> Hal ini memberikan kita pemahaman bahwa adanya pengaruh dari dampak fungsi RTH pada kualitas yang dimiliki oleh RTH itu sendiri.

Keberadaan RTH yang inklusif tentunya menjadi urgensi mengingat keberagaman pengguna yang mengaksesnya. Urgensi tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada literatur skripsi yang berjudul “Mendesain Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Publik yang Inklusif bagi Masyarakat Kota Jakarta”. Pada penelitian ini dijelaskan jika taman kota merupakan ruang terbuka publik yang memiliki arti penting bagi kehidupan bersama masyarakat kota. Taman kota menjadi ruang terbuka yang dapat memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk melakukan interaksi sosial, inklusi sosial, dan pencampuran sosial. Hal ini memberikan kita gambaran tentang adanya pengaruh dari fungsi yang dimiliki oleh RTH akan makna keberadaannya di suatu masyarakat. Meskipun kualitas RTH tidak sejalan dengan urgensi keberadaannya bagi masyarakat, tetapi dalam Jurnal Internasional berjudul “How do Urban Parks,

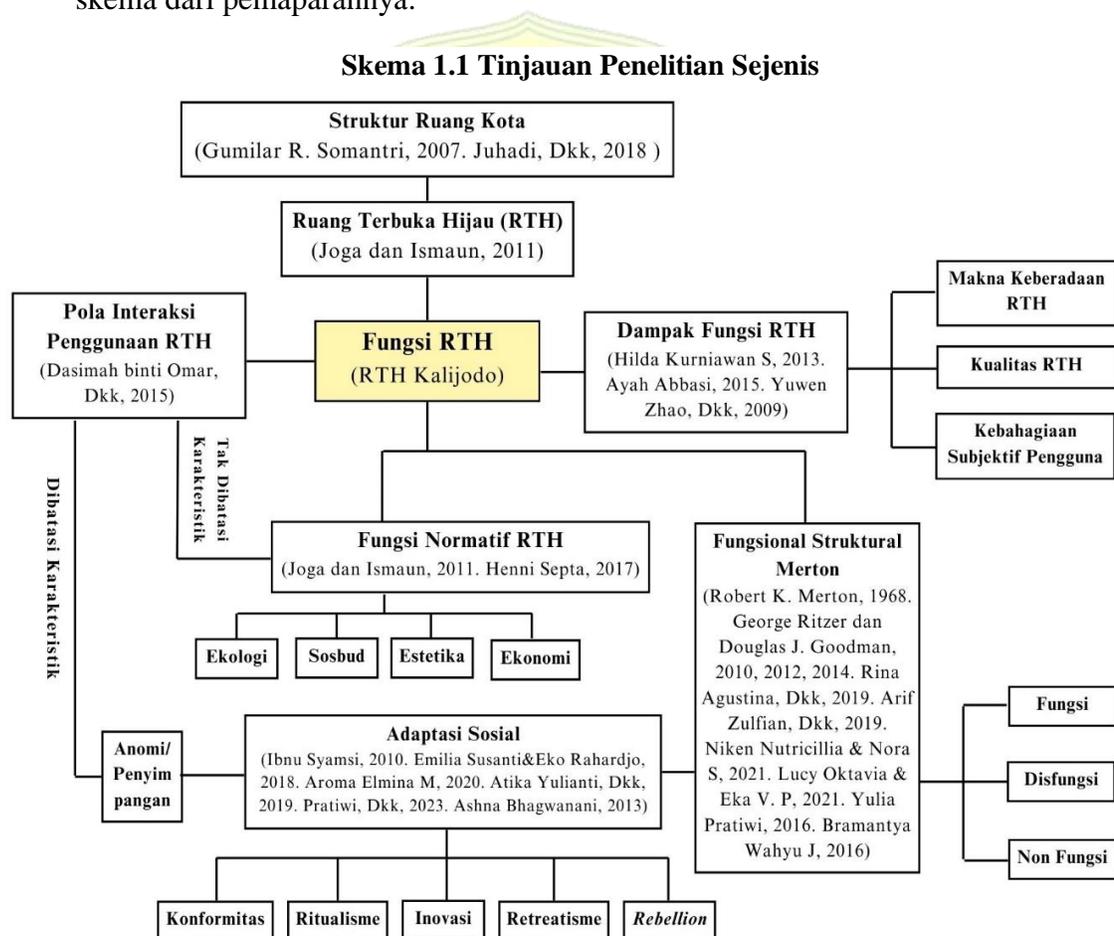
---

<sup>21</sup> Ayah Abbasi, dkk, “Open Space Quality in Deprived Urban Areas: User Perspective an Use Pattern”, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 2015, hlm. 203-204.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 199-200.

Neighborhood Open Spaces, and Private gardens Relate to Individuals Subjective Well-Being: Results of a Structural Equation Model” terbukti membawa pengaruh bagi kebahagiaan subjektif individu. Kepuasan akan ruang hijau, baik itu berupa taman lingkungan, taman pribadi, ataupun RTH akan membawa peranan penting pada peningkatan kebahagiaan subjektif individu.<sup>23</sup>

Berdasarkan tinjauan penelitian sejenis diatas, berikut ringkasan berupa skema dari pemaparannya:



Sumber: Hasil Temuan Penulis (2023)

<sup>23</sup> Yuwen Zhao, dkk, “How do Urban Parks, Neighborhood Open Spaces, and Private gardens Relate to Individuals Subjective Well-Being: Results of a Structural Equation Model”, *Sustainable Cities and Society* 2009, hlm. 6-9.

Setelah pemaparan skema 1.1 mengenai tinjauan penelitian sejenis yang digunakan, peneliti berusaha untuk menjelaskan mengenai posisi penelitian skripsi yang akan dilakukan, Penelitian skripsi yang akan dilakukan akan mengkaji terkait dengan keberagaman fungsi sosial kawasan Kalijodo sebagai RTH di perkotaan. Keberagaman fungsi ini turut berdampak pada adanya pembagian ruang berbasis zonasi yang diterapkan pada RTH Kalijodo. Dengan demikian, untuk memudahkan penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan menggunakan teori struktural fungsional dari Robert K. Merton sebagai rujukan utama dan konsep struktur ruang kota, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai konsep yang mendukung penelitian terkait dengan fungsi ruang terbuka kota ini. Dengan demikian, dari penelitian sejenis yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat poin-poin penting pada hasil penelitian, sehingga penelitian sebelumnya dapat menjadi perbandingan dengan skripsi yang peneliti lakukan. Sedangkan rujukan dari berbagai buku untuk mendukung tulisan ini sebagai wawasan tambahan untuk menunjang dan memperkaya penelitian sebagai bahan penelitian skripsi.

## **1.6. Kerangka Konseptual**

### **1.6.1 Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton**

Pemikiran struktural fungsional yang dimiliki oleh Robert King Merton memiliki karakteristik yang membedakan pemikirannya dengan gurunya Talcott Parsons. Jika Parsons lebih memfokuskan hal ini dengan motif-motif individual, pemikiran Merton lebih memusatkan perhatiannya pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kultur.<sup>24</sup> Dalam analisa fungsionalnya, Merton mencoba untuk membuat batasan konsep analitis dan berusaha menjelaskan jika terdapat beberapa

---

<sup>24</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *op.cit.*, hlm. 137-138.

ketidakpastian dari arti yang terdapat pada postulat-postulat kaum fungsional. Setidaknya terdapat tiga postulat dasar dalam analisis struktural yang dikritisi dan akan disempurnakan olehnya satu demi satu, yaitu:

1. **Postulat pertama** berisi tentang sebuah kesatuan fungsional masyarakat yang mampu diatasi. Maksudnya terdapat suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang dapat diatasi atau diatur.<sup>25</sup> Merton menganggap kesatuan fungsional yang sempurna ini tidak mungkin terjadi pada masyarakat yang tentunya luas dan kompleks. Hal ini tidak lain adalah karena bisa saja jika suatu hal bersifat fungsional bagi suatu kelompok (menunjang integrasi dan kohesi bagi suatu kelompok, akan tetapi disfungsi (mempercepat kehancuran) bagi kelompok lain. Kemunculan disfungsi bagi Merton merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Fungsional bagi sebagian kelompok masyarakat akan dapat menjadi tidak fungsional bagi kelompok masyarakat lain.<sup>26</sup>
2. **Postulat kedua** berisi tentang adanya fungsionalisme *universal*. Maksud dari postulat ini adalah adanya 'keyakinan' akan setiap fungsi-fungsi positif dari seluruh bentuk kebudayaan dan struktur sosial yang sudah baku.<sup>27</sup> Merton menyampaikan ketidaksetujuannya akan postulat kedua ini. Menurutnya, setiap elemen tersebut bersifat relatif dan maka dari itu lebih baik

---

<sup>25</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 34.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

mempertimbangkannya dengan kriteria keseimbangan konsekuensi fungsional. Konsekuensi fungsional ini dilihat dari konsep fungsi positif dan disfungsi yang digagas olehnya. Konsep fungsi menjadi penting sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati dan dibuat untuk tujuan penyesuaian dari sistem tersebut. Sedangkan di sisi lain, konsep disfungsi juga menjadi penting untuk melihat konsekuensi-konsekuensi yang berpotensi merusak atau berakibat negatif.

3. **Postulat ketiga** berisi tentang *indispensability*. Maksud dari postulat ini adalah dalam setiap tipe peradaban, kebiasaan, ide, obyek materil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan.<sup>28</sup> Merton kembali mengkritisi postulat terakhir ini dengan mengatakan jika terdapat kemungkinan alternatif fungsional yang harus diperhitungkan dalam setiap analisa fungsional.

*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

Tabel 1.1 Karakteristik Analisa Struktural Robert K. Merton

Nomor Postulat	Isi Postulat	Pandangan Merton
Postulat 1	Kesatuan fungsional masyarakat (suatu keadaan integrasi tinggi (tanpa konflik) yang dicapai dari keyakinan akan fungsionalitas dari setiap bentuk kebudayaan dan struktur sosial yang sudah baku)	1) Kesatuan fungsional tidak mungkin terjadi pada masyarakat yang luas dan kompleks 2) Kemunculan disfungsi tidak boleh diabaikan. Bisa saja fungsional bagi sebagian kelompok tetapi menjadi disfungsi bagi kelompok masyarakat lain
Postulat 2	Fungsionalisme <i>universal</i> (semua bentuk kebudayaan dan struktur sosial yang sudah baku selalu memiliki nilai positif)	1) Setiap elemen tersebut bersifat relatif 2) Lebih baik mempertimbangkannya dengan kriteria keseimbangan konsekuensi fungsional
Postulat 3	<i>Indispensability</i> (semua aspek yang sudah baku, selain fungsional, juga merupakan cerminan dari kebutuhan dalam masyarakat sebagai satu kesatuan; struktur dan fungsi yang sudah ada menjadi penting dan tidak membutuhkan struktur dan fungsi lain)	1) Terdapat alternatif struktur dan fungsi lain dalam masyarakat dan penting untuk diperhatikan

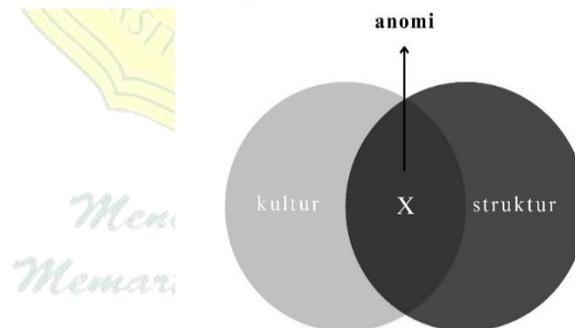
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2024)

Dari pandangannya akan ketiga postulat ini, Merton berupaya untuk menggambarkan hubungan antara kebudayaan, struktur, dan juga anomie.<sup>29</sup> Merton mendefinisikan kebudayaan (kultur) sebagai serangkaian nilai normatif teratur yang mengendalikan perilaku dan

<sup>29</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *loc.cit.*

diberlakukan sama kepada seluruh anggota masyarakat atau kelompok tertentu. Di sisi lain, struktur sosial adalah serangkaian hubungan sosial teratur yang mempengaruhi anggota masyarakat atau kelompok tertentu dengan satu atau lain cara. Kedua hal ini dapat saling berhubungan dan menghasilkan suatu keadaan yang anomi ketika terdapat keterputusan hubungan (disfungsi) antara norma dan tujuan kultural yang terstruktur secara sosial dengan kemampuan anggota masyarakat atau kelompok untuk bertindak menurut norma dan tujuan tersebut. Secara singkat dapat dikatakan salah satu penyebab dari ketidakmampuan seseorang untuk bertindak menurut nilai-nilai normatif yang dimilikinya adalah karena posisi mereka di dalam suatu struktur sosial. Akibat dari hal ini, individu yang mengalami anomi tersebut akan memperlihatkan perilaku yang menyimpang untuk mencapai nilai normatif tersebut.

**Gambar 1.3 Hubungan antara Kultur, Struktur, dan Anomi**



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2024)

Dari hal yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat melihat jika Merton melihat kebudayaan dan struktur sosial, tidak hanya pada fungsi dari setiap struktur tersebut tetapi juga pada disfungsi, yang dalam hal ini disebut oleh dirinya sebagai anomi. Keadaan anomi ini lebih lanjut dihubungkan oleh Merton dengan lahirnya penyimpangan yang menurutnya merupakan konsekuensi dari adanya disfungsi antara

kebudayaan dengan struktur. Pemikiran Merton yang demikian memperkuat keunikan karakteristik struktural fungsional miliknya yang diwarnai dengan sikap kritis tersirat akan stratifikasi sosial di masyarakat. Jadi, jika pada awal ketiga postulat dari Davis dan Moore mendukung adanya stratifikasi masyarakat, Merton lebih mengidentifikasi bahwa para fungsionalis struktural dapat bersikap kritis terhadap stratifikasi sosial tersebut.<sup>30</sup> Untuk melengkapi pemikirannya ini, Merton juga menjelaskan tentang tipe-tipe adaptasi yang dilakukan oleh seorang individu dalam menghadapi anomie ini. Beliau ingin menekankan dengan jelas mengenai bagaimana struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku yang konformis, tetapi juga menghasilkan perilaku yang menyimpang. Meskipun tujuan dari struktur sosial tersebut telah direncanakan dan cara untuk meraih tujuan tersebut pun telah diatur, kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan menurut Merton pasti ada. Berangkat dari adanya kemungkinan penyimpangan itulah, Merton pada akhirnya dapat mengidentifikasi lima (5) tipe adaptasi yang dilakukan oleh seorang individu untuk menghadapi penyimpangan tersebut.

Tipe pertama, yakni konformitas (*conformity*) yang merupakan suatu keadaan dengan warga masyarakat yang tetap menerima tujuan yang membudaya (*goals*) dan cara yang melembaga (*institutionalized means*) yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral.<sup>31</sup> Pada tipe adaptasi ini seorang individu akan memiliki tujuan yang sama dengan yang telah disepakati oleh struktur. Cara individu tersebut dalam mencapai tujuan ini pun sesuai dengan apa yang sudah

---

<sup>30</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *op.cit.*, hlm. 274.

<sup>31</sup> Sulstyarta dan Maya Hehanusa, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2016), hlm. 30.

seharusnya ia lakukan untuk mencapai tujuan tersebut (cara konvensional dan melembaga). Tipe konformitas ini merupakan tipe adaptasi yang paling umum dan tersebar luas di masyarakat.<sup>32</sup> Merton berpendapat stabilitas dan kesinambungan masyarakat tidak akan terjaga jika tidak ada adaptasi konformitas ini.<sup>33</sup> Akan tetapi, Merton sendiri berusaha untuk tidak menggali terlalu dalam pada adaptasi konformitas ini mengingat fokus utamanya yang berpusat pada kecenderungan munculnya penyimpangan (anomi) di masyarakat.<sup>34</sup>

Jika dikaitkan dengan pemikiran fungsional Merton, tipe adaptasi ini berupaya untuk mewujudkan fungsi nyata yang lahir dari suatu praktik kultural dan aktivitas sosial dengan tujuan mencapai cita-cita kolektif, atau yang sering disebut oleh Merton sebagai fungsi manifes (*intended function*).<sup>35</sup> Masyarakat yang konformis akan menyesuaikan dirinya untuk mencapai fungsi manifes tersebut dengan menggunakan cara yang memang dilegitimasi atau diakui sebagai cara untuk mencapai hal tersebut. Dapat dikatakan dalam hal ini fungsi yang dihasilkan memiliki konsekuensi yang positif karena mampu menghasilkan perilaku konformis untuk mencapai tujuan yang memang direncanakan/diupayakan ketercapaiannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Merton yang mengidentifikasi fungsi manifes ke dalam konsekuensi positif dan dapat diantisipasi (*anticipated consequences*).

Tipe adaptasi kedua, yakni inovasi (*innovation*). Pada tipe ini, tujuan yang ada di dalam masyarakat diakui dan dipelihara, tetapi

---

<sup>32</sup> Robert K. Merton, *Social Structure and Anomie*, (Cambridge: American Sociological Review, 1938), hlm. 677-678.

<sup>33</sup> Robert K. Merton and Piotr Sztompka, *On Social Structure and Science*, (Chicago: U of Chicago P, 1996), hlm. 195.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>35</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *op.cit.*, hlm. 137.

dengan mengubah cara yang telah melembaga dalam mencapai tujuan tersebut. Tipe adaptasi ini tidak hanya bermakna positif (dengan menemukan cara yang lebih kreatif) tetapi juga kemungkinan adanya praktik negatif yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut juga dapat dikategorikan termasuk ke dalam jenis adaptasi tipe kedua ini (termasuk dalam hal ini tindak kriminal). Dua kemungkinan yang bertolak belakang tersebut dapat terjadi mengingat tipe adaptasi ini yang berorientasi pada peluang dan pengambilan resiko yang sering kali didorong oleh rasa ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang diakui oleh masyarakat<sup>36</sup>.

Jika dikaitkan dengan pemikiran fungsional Merton, tipe adaptasi jenis ini dapat terlihat dalam fungsi laten (*unintended function*) dari suatu struktur. Fungsi laten sendiri didefinisikan sebagai fungsi tersembunyi yang lahir dari suatu praktik kultural dan aktivital sosial.<sup>37</sup> Dalam hubungannya dengan tipe adaptasi berupa inovasi, fungsi laten sendiri merupakan hasil dari keragaman cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Fungsi ini bersifat tersembunyi dan cenderung tidak direncanakan. Meskipun begitu, konsekuensi positif yang dapat terjadi dari keberadaan fungsi ini pun tidak dapat diabaikan kemungkinannya. Hal ini dikarenakan fungsi laten menurut Merton termasuk ke dalam konsekuensi yang tidak diantisipasi (*unanticipated consequences*), tetapi bersifat positif.

Tipe adaptasi selanjutnya, yaitu ritualisme (*ritualism*). Jenis adaptasi ini dapat terjadi ketika tujuan yang sudah membudaya di masyarakat tidak lagi menjadi acuan dari perilaku seseorang, tetapi

---

<sup>36</sup> Robert K. Merton, *loc.cit.*

<sup>37</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *op.cit.*, hlm. 138.

seseorang tersebut tetap menggunakan cara-cara yang telah melembaga di masyarakat.<sup>38</sup> Pola pikir kaum ritualis seringkali didasarkan pada anggapan bahwa tujuan yang tinggi akan mengundang frustrasi dan bahaya sedangkan tujuan yang lebih rendah akan menghasilkan kepuasan dan keamanan.<sup>39</sup> Secara singkat, adaptasi tipe ini mewakili Keputusan individu untuk berhenti terlibat dalam segala bentuk perjuangan yang kompetitif.<sup>40</sup>

Jika dikaitkan dengan pemikiran fungsional Merton, ritualisme termasuk ke dalam disfungsi manifes dari suatu struktur. Dapat dikatakan demikian karena tujuan yang ada di masyarakat tidak lagi menjadi acuan dari suatu struktur. Meskipun masyarakat dalam hal ini tetap menggunakan cara yang diakui dalam pemenuhan tujuan tersebut, akan tetapi mulai kehilangan fokus untuk menjadikan tujuan tersebut sebagai acuan. Maka dari itu, tidak heran jika konsekuensi negatif pun muncul sebagai dampak dari hal ini. Akan tetapi, konsekuensi negatif yang muncul ini menurut Merton masih berada pada hal yang dapat diantisipasi keberadaannya (*anticipated consequences*).

Tipe adaptasi keempat, yaitu penarikan diri (*retreatism*). Tipe ini didefinisikan sebagai suatu keadaan dengan warga masyarakat yang menolak tujuan dan juga cara yang telah dikehendaki dan melembaga<sup>41</sup>. Para kaum retreatis merupakan individu-individu yang menunjukkan keinginan kuat untuk “melarikan diri” dari semua persyaratan sosial yang dikehendaki di masyarakat<sup>42</sup>. Secara sosiologis, kondisi ini disebut

---

<sup>38</sup> Robert K. Merton, *loc.cit.*

<sup>39</sup> Robert K. Merton dan Piotr Sztompka, *op.cit.*, hlm. 146.

<sup>40</sup> Robert K. Merton and Piotr Sztompka, *op.cit.*, hlm. 203.

<sup>41</sup> Robert K. Merton, *loc.cit.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

dengan teralienasi.<sup>43</sup> Dari hal ini pula, tidak heran jika adaptasi retreatisme sering dianggap sebagai model adaptasi yang bersifat pribadi atau "diprivatisasi" dan bukan kolektif.<sup>44</sup>

Jika dikaitkan dengan pemikiran fungsional Merton, tipe adaptasi yang menolak tujuan dan juga cara yang telah dikehendaki ini dapat terlihat dalam disfungsi laten dari suatu struktur. Penolakan akan tujuan dan juga cara ini diperlihatkan oleh mereka dalam apa yang disebut oleh masyarakat luas sebagai penyimpangan. Mereka berupaya untuk membebaskan diri dari kurungan "penjara bayangan" yang membatasi mereka untuk menunjukkan eksistensi dari apa yang benar-benar menjadi keputusannya. Maka dari itu, tidak heran jika Merton menyebut disfungsi laten ini sebagai konsekuensi negatif yang tidak diantisipasi keberadaannya (*unanticipated consequences*).

Tipe adaptasi terakhir dalam pemikiran Merton, yaitu pemberontakan (*rebellion*). Pada tipe adaptasi ini tujuan dan juga cara yang ada di masyarakat ditolak dan berusaha untuk diganti atau diubah seluruhnya.<sup>45</sup> Hal ini dikarenakan tujuan yang telah ada sebelumnya merupakan penghalang dari tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut juga tidak diakui. Penolakan ini sendiri sebenarnya berakar dari ketidakmampuan mereka untuk memenuhi tujuan yang dikehendaki dalam masyarakat melalui cara yang yang dilegitimasi. Maka dari itu tidak heran jika setiap kali ditemukan penghalang dalam mencapai tujuan yang dilegitimasi di masyarakat, adaptasi berupa pemberontakan merupakan kemungkinan yang tidak dapat dihindari dapat terjadi.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Robert K. Merton dan Piotr Sztompka, *op. cit.*, hlm. 149.

<sup>45</sup> Robert K. Merton, *loc.cit.*

Jika dikaitkan dengan pemikiran fungsional Merton, tipe adaptasi jenis ini dapat terlihat dalam aspek non-fungsi dari suatu struktur sosial di masyarakat. Dalam pandangan Merton, non fungsi didefinisikan sebagai suatu bagian (aktivitas dan praktik) yang tidak memiliki sumbangan terhadap sistem sosial manapun, atau dapat diartikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang sama sekali tidak relevan dengan sistem yang ada.<sup>46</sup> Ketika pembangkangan diadopsi menjadi tipe adaptasi untuk menghadapi penyimpangan, maka mereka akan menolak untuk mematuhi tujuan dan juga cara-cara yang ada dalam masyarakat. Mereka akan menganggapnya tidak lagi relevan atau tidak berkontribusi pada kehidupan mereka. Mereka akan berusaha untuk menjadi sesuatu yang baru dan lebih memuaskan bagi mereka.

**Tabel 1.2 Model of Adaptation Robert K. Merton**

No.	Bentuk Adaptasi	Tujuan yang Membudaya ( <i>goals</i> )	Cara yang Melembaga ( <i>institutionalized means</i> )
1.	Konformitas ( <i>conformity</i> )	+	+
2.	Inovasi ( <i>innovation</i> )	+	-
3.	Ritualisme ( <i>ritualism</i> )	-	+
4.	Penarikan diri ( <i>retreatism</i> )	-	-
5.	Pemberontakan ( <i>rebellion</i> )	+/-	+/-

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2024)

**Keterangan:**

+ = Penerimaan

- = Penolakan

+/- = Penolakan/penggantian dengan cara baru

<sup>46</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *op.cit.*, hlm. 133.

### 1.6.2 Konsep Struktur Ruang Kota

Dalam teori zona konsentris pertumbuhan kota milik Ernest Burgess dijelaskan bahwa perluasan suatu kota ditandai dengan kecenderungan masing-masing zona dalam memperluas wilayahnya dengan invasi ke zona luar berikutnya. Dengan menggunakan kasus Kota Chicago sebagai lokasi penelitiannya, Burgess membagi kota ke dalam beberapa zona utama, yakni:<sup>47</sup>

#### (1) Kawasan Pusat Bisnis (*Central Business District* (CBD))/Daerah Pusat Kegiatan (DPK)

Karakteristik:

1. Pusat dari segala kegiatan politik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi
2. Zona ini terdiri dari bangunan yang menunjang pemerintahan, perdagangan, toko swalayan, bank, hotel, dan perkantoran
3. Terbagi atas dua wilayah, yakni:
  - a. RBD (*Retail Business District*) dengan kegiatan dominan pertokoan, perkantoran, dan jasa
  - b. WBD (*Wholesale Business District*) yang diperuntukkan sebagai kegiatan ekonomi skala besar, seperti pasar, pergudangan (*warehouse*), dan gedung penyimpanan barang supaya tahan lama (*storage buildings*)

---

<sup>47</sup> Ernest W. Burgess, *loc.cit.*

**(2) Zona Peralihan (ZPN)/transition zone**

Karakteristik:

1. Merupakan kawasan perindustrian rendah (industry baru), dengan banyak pengalihanfungsian rumah pribadi kuno menjadi areal perindustrian dan perkantoran
2. Wilayah dengan penurunan kualitas lingkungan karena adanya pengambilalihan lahan pemukiman oleh zona 1 untuk dijadikan fungsi perdagangan dan industri
3. Terbentuknya permukiman kumu (*slum area*) yang semakin lama menjadi daerah miskin (*areas of proverty*), sebagai akibat dari adanya pengambilalihan lahan terus menerus
4. Penghuninya biasanya merupakan kelompok masyarakat imigran

**(3) Zona Perumahan Pekerja yang Bebas (ZPPB)/Low-class residential homes zone**

Karakteristik:

1. Merupakan kawasan pemukiman bagi para pekerja, seperti pekerja pabrik dan industri yang di antaranya adalah pendatang-pendatang baru dari zona 2. Kondisi pemukimannya masih lebih baik jika dibandingkan dengan zona 2. Dipilih menjadi kawasan pemukiman oleh para pekerja karena lokasinya dekat tempat kerja
2. Penghuninya merupakan mereka yang berada dalam kelompok menengah ke bawah

**(4) Zona Pemukiman yang Lebih Baik (ZPB)/*zone of better resident***

Karakteristik:

1. Penghuni dari kawasan ini adalah kelompok masyarakat menengah ke atas.
2. Kondisi ekonomi para penghuni yang stabil mengakibatkan lingkungan permukimannya menunjukkan derajat keteraturan yang cukup tinggi
3. Fasilitas dalam pemukiman pada kawasan ini yang terencana dengan baik sehingga kenyamanan pada kawasan ini dapat dirasakan

**(5) Zona Penglaju (ZP)/*commuter zone***

Karakteristik:

1. Kawasan ini lebih baik dan nyaman sebagai lingkungan tempat tinggal karena memiliki sarana dan prasarana lengkap
2. Kawasan ini dihuni oleh kelompok penglaju
3. Timbulnya kelompok penglaju yang menghuni kawasan ini adalah sebagai akibat dari proses desentralisasi permukiman sebagai dampak sekunder dari aplikasi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi

Model ini dikritik dan dikembangkan lebih lanjut oleh Hoyt.<sup>48</sup> Dia menyarankan bahwa pertumbuhan perkotaan secara kompleks tidak hanya memamerkan pola sederhana dari seperti yang ada pada zona konsentris.<sup>49</sup> Hal ini terbukti salah satunya dari ketidaksesuaian teori perkotaan ini pada struktur perkotaan Jakarta. Hal ini dikarenakan

---

<sup>48</sup> Gumilar R. Somantri, *loc.cit.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

Jakarta dianggap mewakili sebuah kampung perkotaan raksasa (*a single gigantic urban kampung*). Pada karakteristik ini suatu wilayah memiliki hierarki peringkat pusat kota, mulai dari pusat primer (inti), pusat sekunder, dan pusat tersier. Pusat ini secara historis merupakan sebuah “satelit” (pelengkap kota) dari kota-kota utama di Jakarta.

Secara historis, kota Jakarta berkembang melalui integrasi beberapa “kota satelit” (pelengkap kota) menjadi kota induk, yakni Batavia (Jakarta). Sebagai akibat dari meningkatnya kemakmuran ekonomi di kota-kota dan keamanan yang membaik di sekitarnya, Batavia menggabungkan kota-kota satelit pinggirannya ke dalam sistem kontrol politiknya. Proses penggabungan ini juga terjadi di beberapa wilayah selama periode perkembangan Jakarta yang lebih baru. Proses ini berimplikasi pada ciri khas kota Jakarta yang menjadi kota yang memiliki urban sistem yang terdiri dari inti (bagian pusat Jakarta/wilayah pusat), beberapa pusat sekunder dan juga beberapa pusat tersier. Penyusunan hierarkis ini didasarkan pada ukuran geografis, kekayaan, dan juga kepentingan politik dari inti hingga ke bagian tersier. Dengan demikian, dapat dilihat jika sistem perkotaan Jakarta adalah model pusat kota yang dimodifikasi. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut.<sup>50</sup>

### 1) Pusat Inti:

Karakteristik:

- a. Struktur tata ruang kota didominasi oleh fasilitas perkotaan yang menjadi pusat dari segala aktivitas masyarakat, seperti: kantor pusat pemerintahan (istana presiden, kantor pusat bank, kantor pusat perusahaan besar, stasiun kereta api pusat, hotel

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 80-89.

internasional, pusat perdagangan dan perbelanjaan, rumah sakit pusat, perguruan tinggi terkemuka, monument negara, rumah ibadah negara.

- b. Kawasan yang termasuk dalam pusat inti Jakarta adalah Monas, Senen, dan persimpangan segitiga emas Jakarta (Thamrin, Sudirman, Rasuna Said, dan Gatot Subroto)

Karakteristik fasilitas perkotaan dalam pusat inti Jakarta ini ternyata juga dapat ditemukan pada daerah-daerah pinggirannya. Akan tetapi, fasilitas yang ada ini memiliki cakupan ukuran geografis, kekayaan, dan kepentingan politik yang berbeda dengan pusat inti Jakarta. Kawasan inilah yang disebut dengan pusat sekunder dari Jakarta.

## 2) Pusat Sekunder:

Karakteristik:

- a. Memiliki ukuran geografis dan kompleksitas yang lebih kecil dibandingkan pusat inti utama. Pada pusat sekunder ini ditemukan fasilitas perkotaan, seperti: kantor pemerintahan daerah, kantor cabang bank dan perusahaan, usaha kecil hotel, pusat perbelanjaan kecil, patung, masjid dan gereja, perguruan tinggi yang kurang dikenal, dll
- b. Kawasan yang termasuk ke dalam pusat sekunder dari Jakarta adalah Kebayoran Baru

## 3) Pusat Tersier:

Karakteristik

- a. Dicirikan dengan kehadiran fasilitas perkotaan yang kurang penting jika dibandingkan dengan pusat sekunder kota. Terdapat fasilitas perkotaan, seperti kantor pemerintahan kecamatan, kantor cabang wilayah bank, pertokoan, bioskop

dengan film-film yang kurang populer, rumah ibadah yang lebih kecil, dsb

Singkatnya, fasilitas perkotaan berkurang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dari inti, ke pusat kota sekunder, dan kemudian direduksi selanjutnya di pusat-pusat kota tersier yang berdekatan dengan daerah pedesaan atau kampung hutan. Kondisi perkotaan ini menunjukkan teori klasik pusat tempat (*Teori der zentralen Orte*) dari Walter Christaller (1968), sebuah Ahli geografi ekonomi Jerman. Dia membuat pernyataan resmi pertamanya dari teori tersebut dalam bukunya *on Die zentralen Orte in Sü* (Tempat-tempat Sentral di Jerman Selatan).

Secara umum, gagasan Christaller dapat dimodifikasi dan digunakan untuk menganalisis pola perkembangan Asia Tenggara kota-kota khususnya Jakarta. Dalam pengertian ini, kita dapat melihat pusat wilayah Jakarta sebagai 'pusat' penting dari sistem perkotaan Jakarta. Pusat-pusat lainnya telah terikat dalam hierarki jaringan sosial ekonomi, politik dan spasial pusat-pusat kota Jakarta. Hierarki titik pusat wilayah perkotaan kota Jakarta ini memiliki persepsi subektif yang berbeda-beda ddari penduduk Jakarta. Untuk pelacur kelas bawah sentralitas mungkin terkait dengannya kegiatan usaha sehari-hari di Tanjung Priok misalnya. Jakarta pedagang asongan mungkin mengatakan bahwa pusat kota Jakarta adalah Tanah Abang atau Jatinegara.

Hierarki perkotaan Jakarta dalam pembahasan ini tidak diukur secara statistik, tetapi diidentifikasi dari dua langkah. Pertama, didasarkan pada perkembangan sejarah Jakarta. Jelaslah bahwa kota kontemporer berkembang melalui proses penggabungan kota-kota' satelit ' dan perkotaan pelengkap ke kota utama. Kedua, dilakukan

dengan membandingkan pusat kota utama dengan pusat kota yang lebih kecil. Dua perspektif dasar ini mengarah pada kesimpulan deskriptif bahwa pusat-pusat kota dapat dilihat, dalam banyak hal dan menemukan kemiripan.

### 1.6.3 Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau, ruang ini didefinisikan sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.<sup>51</sup> Sementara itu, jika kita berangkat pada skala aturan yang lebih luas, RTH juga telah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 tahun 2008, sebagai lahan terbuka pada area perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi untuk mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut, seperti keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan.<sup>52</sup> Dalam aturan ini turut dijelaskan pula dijelaskan tentang tipologi RTH yang didasarkan pada empat aspek, dan aspek kepemilikan menjadi aspek pertama yang akan dibahas dalam hal ini.

Berdasarkan aspek kepemilikan, RTH terbagi atas RTH publik dan privat. RTH publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh instansi pemerintah (pusat maupun daerah). Sedangkan RTH privat merupakan RTH yang dimiliki oleh masyarakat maupun pihak swasta.<sup>53</sup> Akan tetapi, pendefinisian ini tidak membatasi kenyataan di lapangan,

<sup>51</sup> Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 09 tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau, pasal 1.

<sup>52</sup> Cori Mentari Tambunan, *loc.cit.*

<sup>53</sup> Joga dan Ismaun, *op.cit.*, hlm. 36.

karena saat ini banyak juga terdapat RTH yang dimiliki dan dikelola oleh privat, akan tetapi dapat diakses secara terbuka oleh publik. Ruang yang termasuk RTH publik, yaitu taman kota, taman lingkungan, taman interaksi, dan juga taman pemakaman umum. Beragam jenis taman ini berada dibawah pengelolaan langsung dinas pertamanan dan pemakaman daerah setempat. Pada klasifikasi hutan, seperti hutan lindung, hutan kota, taman hutan raya, pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab dinas kehutanan daerah setempat.

Adapun jalur hijau yang terdapat di suatu wilayah dikelola oleh berbagai instansi terkait, seperti jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, jalur hijau pantai, dan sebagainya. Sementara, yang termasuk ke dalam RTH privat, antara lain adalah halaman/perkarangan, baik berupa taman bangunan maupun taman-taman rekreasi yang dikembangkan pihak swasta.<sup>54</sup> Perbedaan antara kedua jenis RTH ini juga dapat dilihat dari aksesibilitas keduanya. RTH publik memiliki aksesibilitas yang tinggi bagi masyarakat karena dapat digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa perlu membayar biaya masuk (gratis). Hal ini dikarenakan pembangunan RTH publik didasarkan pada orientasi non-profit. Berbeda dengan RTH publik, RTH privat yang dikelola oleh swasta, memiliki aksesibilitas yang lebih terbatas karena tidak semua masyarakat dapat mengakses dan terkadang perlu membayar biaya masuk bagi mereka yang ingin masuk dan menggunakan ruang terbuka ini.

Pembangunan RTH yang bersifat publik memiliki tantangan yang cukup signifikan dalam pengelolaannya. Keberlanjutan dan

---

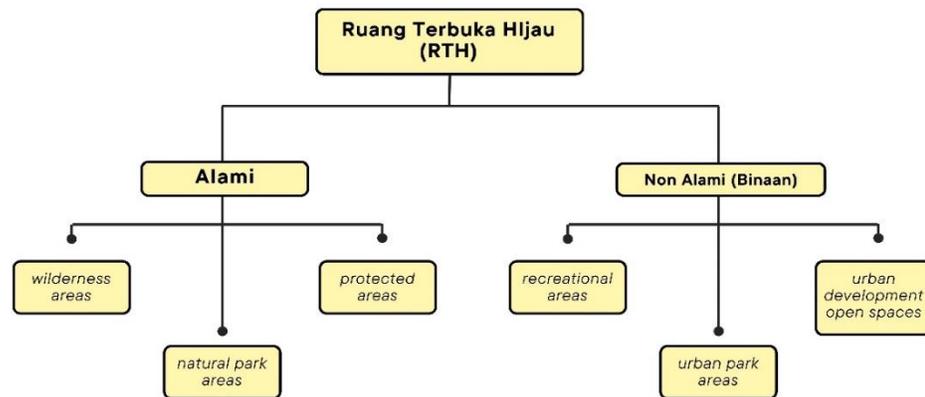
<sup>54</sup> Ditta, Skripsi: "Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta" (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), hlm. 3.

kondisi optimal RTH publik ini menjadi perhatian utama mengingat tingginya aksesibilitas ruang ini karena karena manfaatnya kepada masyarakat penggunanya. Dalam konteks ini, permasalahan kontrol terhadap penggunaan dan pemeliharaan RTH publik dapat dikatakan lebih kompleks jika dibandingkan dengan RTH yang bersifat privat. Salah satu tantangan utamanya adalah adanya potensi kerusakan atau penyalahgunaan RTH oleh pengguna, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan aksesibilitas yang terbuka luas, pengelolaan dan pemeliharaan RTH publik memerlukan strategi yang matang untuk menjaga agar ruang tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Pihak pengelola harus menerapkan sistem pengawasan dan pemeliharaan yang efektif guna meminimalkan resiko kerusakan atau ketidakberlanjutan. Keberlanjutan RTH publik perlu terus difokuskan mengingat manfaat signifikan yang diberikan oleh ruang ini kepada masyarakat, khususnya bagi golongan menengah ke bawah. Hal ini tidak lain juga merupakan upaya nyata dari perwujudan UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 yang memprioritaskan keberadaan RTH publik di suatu wilayah.

Selain berdasarkan kepemilikan, aspek selanjutnya dari tipologi RTH adalah berdasarkan fisiknya. Berdasarkan aspek ini RTH juga turut terbagi dua, yakni RTH alami dan juga RTH non alami (binaan). RTH alami dapat berupa daerah hijau yang masih alami (*wilderness areas*), daerah hijau yang dilindungi agar tetap dalam kondisi alami (*protected areas*), dan daerah hijau yang difungsikan sebagai taman publik tetapi tetap dengan mempertahankan karakter alam sebagai basis tamannya (*natural park areas*). Sedangkan RTH non alami merupakan ruang yang sengaja dibangun untuk menjadi ruang terbuka hijau dari yang sebelumnya bukan. Ruang yang termasuk dalam jenis ini adalah

daerah hijau di perkotaan yang dibangun sebagai taman kota (*urban park areas*), daerah hijau yang dibangun dengan fungsi rekreasi bagi warga kota (*recreational areas*), dan daerah hijau antar bangunan maupun halaman-halaman bangunan yang digunakan sebagai area penghijauan (*urban development open spaces*). Khusus daerah hijau di kawasan perkotaan dapat dikembangkan sebagai plaza, square, jalur hijau jalan, maupun sabuk hijau kota/*greenbelt*. Aspek selanjutnya dari tipologi RTH yang turut membaginya atas dua hal, yakni struktur ruang. Aspek ini menjelaskan jika RTH dapat mengikuti dua pola, yakni pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar) ataupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.<sup>55</sup>

**Gambar 1.4 Tipologi RTH Berdasarkan Fisiknya**



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Keberadaan RTH menurut tipologi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 tahun 2008 dapat pula ditinjau dari aspek fungsinya. Berdasarkan aspek ini, RTH setidaknya memiliki 4 fungsi, yakni fungsi ekologis dengan tiga fungsi tambahan lainnya, yakni fungsi sosial budaya, ekonomi, dan estetika/arsitekural.

<sup>55</sup> Joga dan Ismaun, *op.cit.*, hlm. 94.

Dalam fungsi utamanya, yakni fungsi ekologis, keberadaan RTH difungsikan sebagai paru-paru kota, melindungi sistem air, pemenuhan kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan terbangun/sebagai penyangga, dan juga melindungi masyarakat dari polusi udara. Dalam hal fungsi sosial budaya, RTH dijadikan sebagai ruang untuk rekreasi, pendidikan, dan olahraga serta sebagai tempat bagi masyarakat untuk berinteraksi dan menjalin komunikasi. Fungsi estetika sebagai fungsi selanjutnya, dihadirkan oleh RTH dalam peranannya sebagai pengikat antar elemen bangunan dalam kota, pemberi ciri pembentukan wajah kota dan juga unsur dalam penataan arsitektur perkotaan. Fungsi ekonomi sebagai fungsi terakhir dari keberadaan RTH dihadirkan ketika ruang ini dapat meningkatkan nilai lahan disekitarnya.

**Gambar 1.5 Tipologi RTH**

	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Alami	Ekologis Sosial Budaya	Pola Ekologis	RTH Publik
	RTH Non Alami	Estetika Ekonomi	Pola Planologis	RTH Privat

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Definisi dan tipologi RTH yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan ini tidak menggambarkan keberadaan RTH secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan RTH dalam penggambaran ini hanya terbatas pada keberadaannya sebagai entitas fisik semata. Hal ini mengesampingkan fakta bahwa RTH juga turut menjadi bagian dari

struktur sosial yang kompleks. Penting untuk dicermati jika RTH juga menjadi tempat yang ‘mewadahi’ berbagai interaksi sosial dan juga dinamika yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penting untuk melihat keberadaan RTH dalam persepektif sosiologis. Dalam pendekatan sosiologis, RTH diperhatikan dalam berbagai aspek, mulai dari peran dari tiap aktor yang memanfaatkannya, konstruksi sosial terhadap ruang ini dan juga dampaknya sebagai pembentukan identitas sosial bagi ruang tersebut. Dengan demikian, dari pedefinisian secara sosiologis ini kita dapat melihat keluasan keberadaan RTH dalam suatu struktur sosial di masyarakat.

Sebagai ruang yang mewadahi setiap interaksi dan dinamika yang terjadi di dalamnya, tentu RTH memiliki berbagai fungsi yang melengkapinya. Fungsi tersebut dapat terbagi ke dalam dua level, yakni level mikro dan juga level meso, serta makro. Pada level mikro, RTH dipandang sebagai arena sosial yang memfasilitasi berbagai interaksi dan dinamika individu maupun kelompok dalam masyarakat. Fokus pada level ini mengarah pada pemahaman bagaimana individu dan kelompok berinteraksi di dalam RTH, serta bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi pembentukan hubungan dan identitas sosial. Interaksi sosial ini nantinya akan memperkaya pengalaman sosial dan memfasilitasi pembentukan jaringan sosial bagi seorang individu atau kelompok. Partisipasi pengguna RTH juga dapat membantu memperkuat rasa kepemilikan dan identitas komunitas dari pengguna ruang ini. Mereka akan merasa menjadi bagian dari lingkungan mereka dan merasa terhubung yang lebih luas. Tidak terbatas pada hal tersebut, aktivitas yang dilakukan di RTH juga dapat memberikan manfaat kesejahteraan mental dan emosional bagi seorang individu. RTH dapat menjadi tempat untuk mengekspresikan kreativitas dan menghasilkan

inovasi bagi para penggunanya. Pada level meso dan makro, RTH dipandang memiliki dampak yang lebih luas terhadap struktur sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Biasanya fungsi pada level ini difokuskan pada fungsi yang memang menjadi rencana peruntukannya ketika dibangun. Dengan berdasar pada hal tersebut, fungsi level meso dan makro dari RTH ini haruslah mencakup empat fungsi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 tahun 2008, yakni fungsi ekologis, fungsi sosial budaya, fungsi estetika, dan juga fungsi ekonomi.

Keempat fungsi ini jika dilihat dari sudut pandang sosiologis memiliki pendefinisian masing-masing. Pertama, fungsi ekologi, Fungsi ini jika dilihat dari sudut pandang sosiologis tidak hanya mencakup pada pelestarian alam, tetapi juga pembangunan kesadaran akan lingkungan, penguatan hubungan antara manusia dengan alam, dan juga pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sebagai dampak dari adanya RTH ini. Ruang ini memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan alam di sekitarnya. Melalui fungsi-fungsi ekologis seperti penyerapan polusi udara, penyediaan habitat bagi satwa liar, dan penyerapan air hujan, RTH membantu meminimalkan dampak negatif dari aktivitas manusia dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Tidak terbatas pada hal yang demikian, RTH juga turut berperan sebagai sarana bagi kegiatan edukasi lingkungan dan kesadaran pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perspektif sosiologis, hal ini menciptakan kesadaran kolektif tentang tanggung jawab bersama terhadap lingkungan dan memperkuat hubungan manusia dengan alam. Keberadaan RTH di sisi lain juga turut memiliki dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Udara bersih, akses ke ruang terbuka, dan kesempatan untuk beraktivitas fisik dapat

meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental individu. Ruang ini telah menjadi tempat bagi pembentukan jaringan sosial yang mendukung, meningkatkan rasa solidaritas, dan juga mengurasi isolasi sosial yang mungkin dihadapi oleh beberapa individu.

Fungsi kedua dari keberadaan RTH yang tentunya dapat ditinjau dari pandangan sosiologi, yaitu fungsi sosial budaya. Fungsi ini menegaskan peranan RTH dalam memfasilitasi pusat kegiatan sosial masyarakat, mulai dari pertemuan dan interaksi sosial hingga pembentukan jaringan sosial. RTH menjadi tempat yang mempertemukan setiap individu untuk berinteraksi dan membentuk jaringan sosial. RTH dalam hal ini menciptakan pembentukan solidaritas antara anggota masyarakat. Tidak terbatas pada hal tersebut, pembentukan nilai-nilai budaya dalam masyarakat juga dapat diperkuat dengan keberadaan RTH ini. Melalui kegiatan budaya seperti festival, konser musik, atau pameran seni, RTH menjadi sarana untuk menyebarkan, memperbarui, dan merayakan budaya lokal dan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini nantinya akan menjadi simbol identitas yang menggambarkan jati diri dari masyarakat yang memanfaatkan ruang tersebut. Selanjutnya, fungsi sosial budaya ini juga dapat berdampak pada integrasi sosial masyarakat dari adanya peningkatan solidaritas antar kelompok masyarakat yang beragam. RTH yang menjadi ruang publik yang inklusif bagi berbagai kelompok masyarakat lah yang memperluas peluang terwujudnya hal ini. Terakhir, sebagai implikasi dari fungsi sosial budaya, RTH juga berperan dalam memfasilitasi pembelajaran akan nilai-nilai budaya, keberagaman, dan hubungan antar manusia.

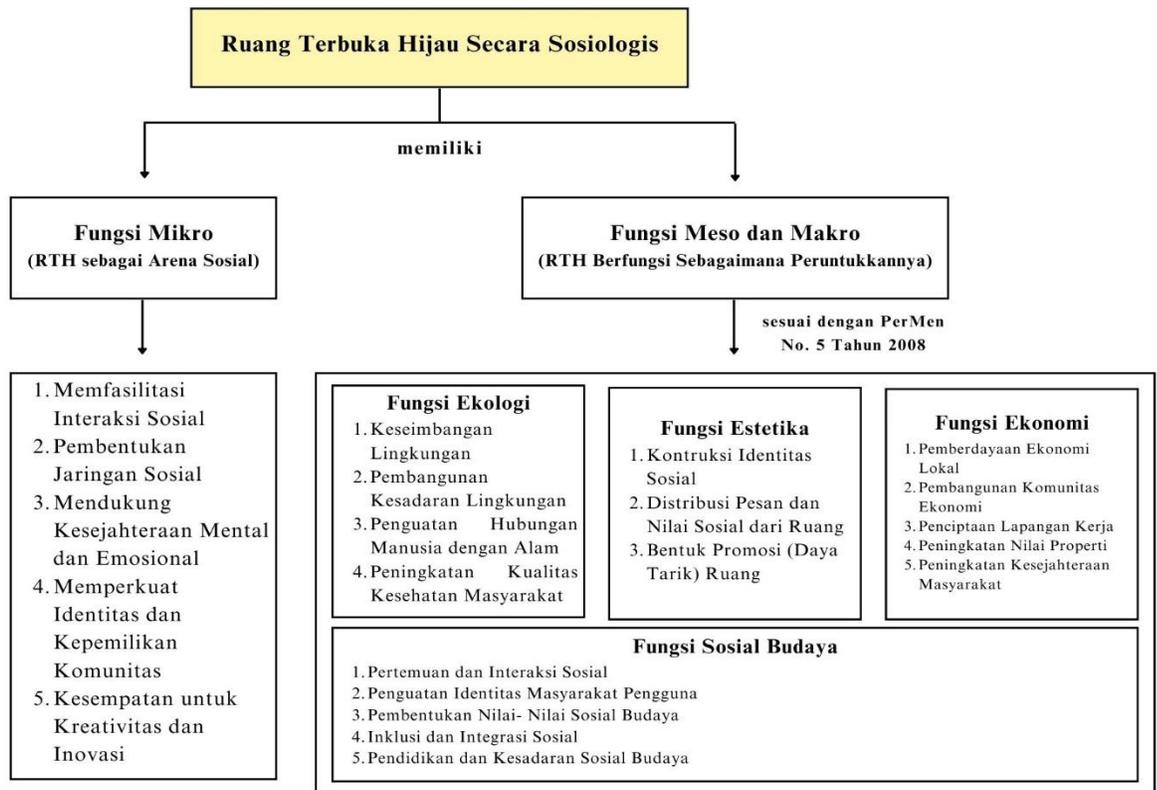
Selanjutnya, fungsi estetika sebagai fungsi RTH yang akan kita tinjau dari sudut pandang sosiologis. RTH dalam hal ini tidak hanya

difokuskan pada aspek visual semata, tetapi juga sebagai proses sosial yang membentuk preferensi dan nilai-nilai dalam masyarakat. RTH sebagai ruang publik yang inklusif memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk berekspresi dan mengonstruksi identitas sosial mereka melalui interaksi dengan lingkungan alam dan seni publik yang ada di dalamnya. Hal ini pada akhirnya memberikan konstruksi identitas sosial dari suatu ruang. Pesan dan nilai sosial dari suatu masyarakat disebarkan melalui ruang ini dan menjadikannya sebagai langkah untuk mempromosikan identitas dari RTH ini sendiri kepada masyarakat.

Fungsi terakhir yang tidak ketinggalan untuk ditinjau dalam sudut pandang sosiologis, yaitu fungsi ekonomi. RTH dalam hal ini mencakup lebih dari sekedar penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga melibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dengan menciptakan peluang bisnis bagi mereka. Tidak hanya itu, peluang terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dalam berbagai bidang juga pun menjadi lebih besar. Hal ini pada akhirnya berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran pada wilayah sekitar RTH tersebut. Lebih lanjut, RTH yang dalam hal ini menjadi pusat kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal, mampu memperkuat ikatan sosial dan kemandirian ekonomi di dalam komunitas pedagang di sana. Komunitas ekonomi lokal dalam RTH secara tidak langsung mulai terbangun. Tidak hanya membangun keterikatan anyara pada penggiat ekonomi lokal, bila properti di sekitar keberadaan RTH juga berpotensi meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya tawaran kemudahan bagi calon pembeli untuk mengakses RTH publik yang inklusif. Secara keseluruhan, fungsi ekonomi dari RTH diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar secara keseluruhan dari masuknya

pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang mereka lakukan.

**Gambar 1.6 RTH dalam Pola Pikir Sosiologis**



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2024)

#### 1.6.4 Hubungan Antar Konsep

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti membuat hubungan antar konsep pada studi penelitian mengenai fungsi sosial ruang terbuka hijau di perkotaan, khususnya RTH Kalijodo. RTH sendiri merupakan bagian integral dari struktur ruang kota yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk di perkotaan. Dalam struktur ruang kota, RTH biasanya di desain dan dikelola dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perkembangan perkotaan yang padang dengan kebutuhan akan

akses terhadap lingkungan yang sehat. Maka dari itu, keberadaannya dalam suatu struktur ruang kota menjadi penting untuk diidentifikasi. Jika mengadopsi pemikiran Burgess tentang pertumbuhan struktur ruang kota yang membagi kota ke dalam lima zona utama, yakni kawasan pusat bisnis/Daerah Pusat Kegiatan (DPK), Zona Peralihan (ZPN), Zona Perumahan Pekerja yang Bebas (ZPPB), Zona Pemukiman yang Lebih Baik (ZPB), dan Zona Penglaju (ZP). Akan tetapi, dikarenakan struktur kota konsentris menurut Burgess ini dianggap tidak dapat mengidentifikasi wilayah kota Jakarta yang kompleks dengan memiliki beberapa kota satelit (pelengkap kota), maka dari itu peneliti kembali menggunakan pandangan lain terkait struktur kota ini, yakni teori klasik pusat tempat (*Teori der zentralen Orte*) dari Walter Christaller. Pandangannya mengatakan jika suatu kota memiliki urban sistem yang dibagi atas beberapa hierarki (tingkatan), yakni pusat inti, beberapa pusat sekunder, dan pusat tersier.

Sebagai ruang publik, RTH Kalijodo sudah pasti memiliki beragam karakteristik pengguna, mulai dari usia, jenis kelamin, kondisi ekonomi, dan juga tingkat pendidikan. Beragam karakteristik ini juga turut mempengaruhi motivasi, frekuensi, serta aksesibilitas dari keberadaan RTH ini di masyarakat. Dari keberagaman karakteristik masyarakat dalam struktur sosial ini pada kenyataannya juga turut mempengaruhi keberagaman fungsi di suatu ruang publik. Fungsi RTH yang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 disebutkan terdapat 4 hal, yakni fungsi ekologi, sosial budaya, estetika, dan ekologi ini, tidak secara keseluruhan dapat diwujudkan keberfungsian oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan kemampuan mereka untuk memenuhi fungsi tersebut sebagai akibat dari kondisi mereka dalam suatu struktur sosial. Kondisi

yang demikian disebut oleh Merton sebagai kondisi anomie atau penyimpangan.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Merton menjelaskan jika masyarakat akan melakukan adaptasi. Setidaknya terdapat lima tipe adaptasi dengan hasil fungsi dari RTH yang berbeda-beda pula. Pertama, tipe konformitas (*conformity*). Pada adaptasi ini masyarakat akan tetap menerima tujuan yang membudaya (*goals*) dan mewujudkannya dengan cara yang melembaga/diakui (*institutionalized means*), sebagai akibat dari adanya tekanan moral. Tipe adaptasi yang pertama ini dapat dilihat dari upaya masyarakat untuk mewujudkan empat fungsi yang memang menjadi peruntukkan dari RTH Kalijodo sebagaimana menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 tahun 2008. Fungsi nyata yang lahir dari suatu praktik kultural dan aktivitas sosial dengan tujuan mencapai cita-cita kolektif ini disebut dalam teori struktural fungsional Merton sebagai fungsi manifes. Masyarakat yang konformis akan menyesuaikan dirinya untuk mencapai fungsi manifes tersebut dengan menggunakan cara yang memang dilegitimasi atau diakui sebagai cara untuk mencapai hal tersebut. Dapat dikatakan dalam hal ini fungsi yang dihasilkan memiliki konsekuensi yang positif karena mampu menghasilkan perilaku konformis untuk mencapai tujuan yang memang direncanakan/diupayakan ketercapaiannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Merton yang mengidentifikasikan fungsi manifes ke dalam konsekuensi positif dan dapat diantisipasi (*anticipated consequences*).

Tipe adaptasi kedua, yakni inovasi (*innovation*). Pada tipe ini, masyarakat akan menerima tujuan yang telah ada, tetapi mengubah cara yang telah melembaga/diakui untuk mencapai tujuan tersebut. Tipe ini terlihat dari fungsi laten (*unintended function*) yang mungkin muncul

dari suatu struktur. Fungsi laten sendiri didefinisikan sebagai fungsi tersembunyi yang lahir dari suatu praktik kultural dan aktivital sosial.<sup>56</sup> Dalam hubungannya dengan tipe adaptasi berupa inovasi, fungsi laten sendiri merupakan keberagaman cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan dari peruntukkan RTH sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PU No. 5 Tahun 2008. Fungsi ini biasanya muncul tanpa disadari oleh pelakunya atau tidak direncanakan sebelumnya. Fungsi laten sendiri menurut Merton termasuk ke dalam konsekuensi yang tidak diantisipasi (*unanticipated consequences*), tetapi bersifat positif.

Tipe adaptasi selanjutnya, yaitu ritualisme (*ritualism*). Jenis adaptasi ini terjadi ketika tujuan yang sudah membudaya di masyarakat tidak lagi menjadi acuan dari perilaku seseorang, tetapi seseorang tersebut tetap menggunakan cara-cara yang telah melembaga di masyarakat. Tipe adaptasi ritualisme menurut Merton ini dapat terlihat dari adanya disfungsi manifes dari suatu struktur. Dapat dikatakan demikian karena masyarakat mulai kehilangan minat/fokus untuk mencapai tujuan yang ada di masyarakat, akan tetapi masih menggunakan cara-cara yang diakui untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kasus RTH Kalijodo, adanya jenis adaptasi ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mewujudkan fungsi dari RTH sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PU, tetapi tidak lagi mencapai esensi tujuan dari adanya fungsi RTH tersebut. Maka dari itu, tidak heran jika konsekuensi negatif pun muncul sebagai dampak dari hal ini. Akan tetapi, konsekuensi negatif yang muncul ini menurut

---

<sup>56</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *op.cit.*, hlm. 137-138.

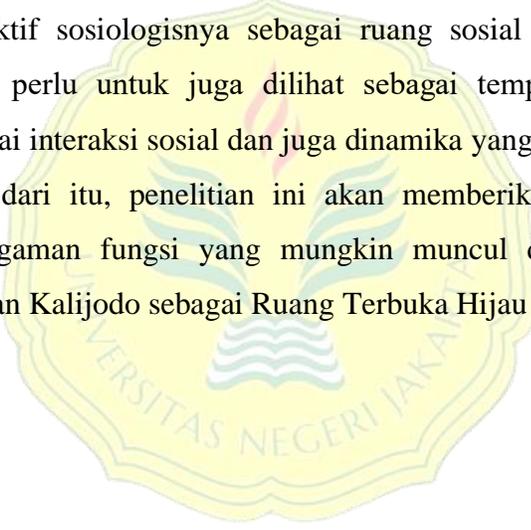
Merton masih berada pada hal yang dapat diantisipasi keberadaannya (*anticipated consequences*).

Tipe adaptasi keempat, yaitu penarikan diri (*retreatism*). Tipe ini terjadi ketika suatu masyarakat menolak tujuan dan juga cara yang telah dikehendaki ataupun melembaga. Tipe adaptasi jenis ini terlihat dari adanya disfungsi laten yang muncul dari suatu struktur. Penolakan akan tujuan dan juga cara ini diperlihatkan oleh mereka dalam apa yang disebut oleh masyarakat luas sebagai penyimpangan. Kelompok masyarakat yang melakukan jenis adaptasi ini akan melakukan segala cara untuk untuk membebaskan diri (menolak) dari pemenuhan tujuan yang tertera sebagai fungsi RTH. Maka dari itu, tidak heran jika Merton menyebut disfungsi laten ini sebagai konsekuensi negatif yang tidak diantisipasi keberadaannya (*unanticipated consequences*).

Tipe adaptasi terakhir dalam pemikiran Merton, yaitu pemberontakan (*rebellion*). Tipe ini terjadi ketika tujuan dan juga cara yang ada di masyarakat ditolak dan berusaha untuk diganti atau diubah seluruhnya. Kelompok ini menganggap jika tujuan yang telah ada sebelumnya merupakan penghalang dari tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut juga tidak diakui. Penolakan ini sendiri sebenarnya berakar dari ketidakmampuan mereka untuk memenuhi tujuan yang dikehendaki dalam masyarakat melalui cara yang yang dilegitimasi. Tipe adaptasi ini sendiri dapat terlihat dari adanya aspek non-fungsi dalam penggunaan RTH Kalijodo. Kelompok masyarakat yang mengadopsi tipe adaptasi ini, akan menolak untuk mematuhi tujuan dan juga cara-cara yang ada dalam masyarakat. Mereka akan menganggapnya tidak lagi relevan atau tidak berkontribusi pada kehidupan mereka. Mereka

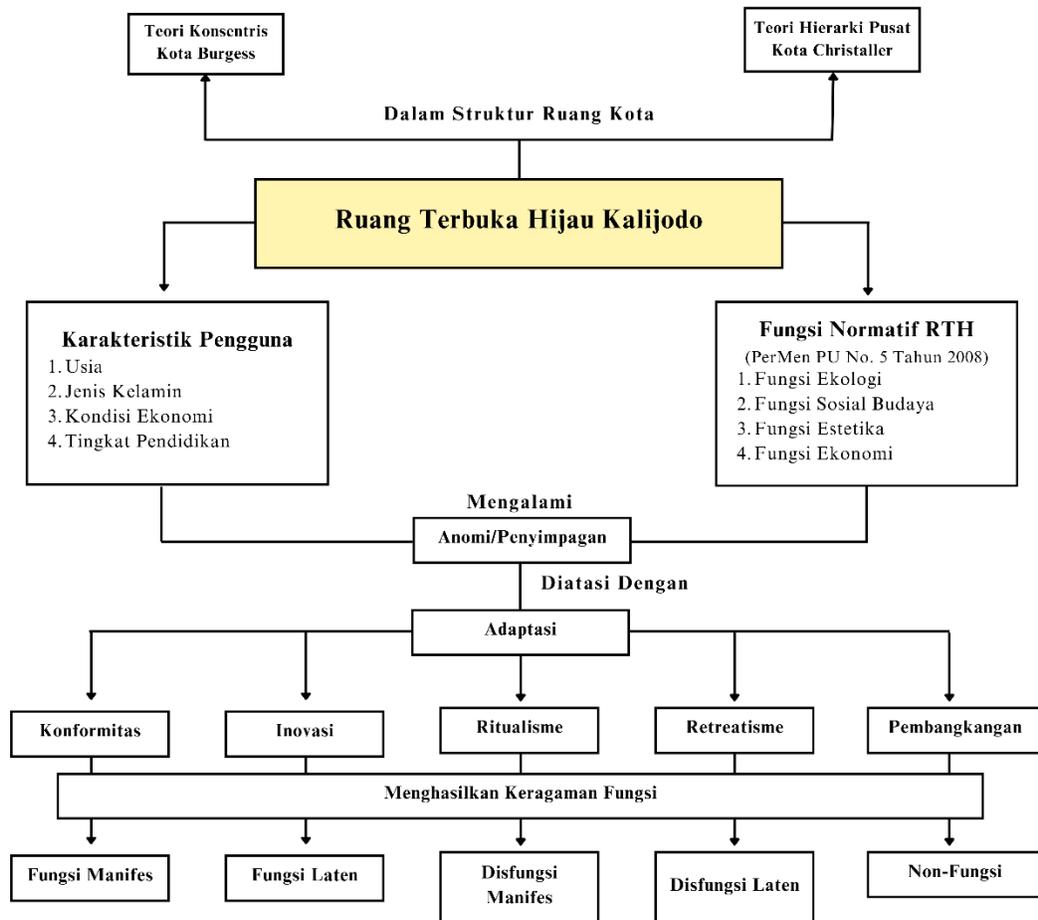
akan berusaha untuk menjadi sesuatu yang baru dan lebih memuaskan bagi mereka.

Konsepsi Merton terkait hubungan antara struktur, budaya (kultur/tujuan), dan juga anomie yang berdampak pada keberagaman fungsi ini sangat sesuai untuk dijadikan teori utama dari penelitian ini yang akan membahas tentang fungsi sosial ruang terbuka hijau di perkotaan, khususnya RTH Kalijodo. RTH tidak hanya didefinisikan dalam pengertiannya sebagai bangunan fisik tetapi juga dalam perspektif sosiologisnya sebagai ruang sosial di masyarakat. RTH sangat perlu untuk juga dilihat sebagai tempat yang ‘mewadahi’ berbagai interaksi sosial dan juga dinamika yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang keberagaman fungsi yang mungkin muncul dalam pengembangan kawasan Kalijodo sebagai Ruang Terbuka Hijau di perkotaan.



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

Skema 1.2 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Hasil Temuan Penulis (2023)

*Memartabatkan Bangsa*

## 1.7. Metodologi Penelitian

### 1.7.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode campuran (*mix method*) yang merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif.<sup>57</sup> Pendekatan kompleks ini tidak hanya mengumpulkan dan

<sup>57</sup> Creswell. J. W, *Research Design Edisi Ketiga: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 4.

menganalisis dua jenis data, tetapi juga melibatkan fungsi dari dua jenis pendekatan penelitian (kuantitatif dan kualitatif) secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar jika dibandingkan dengan keduanya. Pendekatan metode campuran ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana RTH kota dapat beradaptasi dengan dinamika perkembangan kebutuhan dan preferensi masyarakat akan peruntukkan ruang yang beragam. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mendeskripsikan keberagaman fungsi yang muncul dari kawasan Kalijodo dalam keberadaannya sebagai RTH. Identifikasi fungsi dari RTH Kalijodo ini diharapkan dapat mengeksplorasi potensi ruang terbuka dalam memenuhi keberagaman dan preferensi kebutuhan penggunanya. Pendekatan kolaborasi ini dirasa dapat menjadi data utama yang dapat digunakan berdampingan dengan memperkuat satu sama lain.

Adapun strategi metode campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekuensial/bertahap (*sequential mixed method*). Metode ini merupakan prosedur yang di dalamnya peneliti berusaha untuk menggabungkan atau memperluas penemuan-penemuan yang diperoleh dari satu metode dengan penemuan-penemuannya dari metode yang lain.<sup>58</sup> Urutan dalam penggunaan metode dari strategi ini dapat ditentukan oleh masing-masing peneliti, baik itu melakukan penelitian kuantitatif terlebih dahulu ataupun kualitatif terlebih dahulu. Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti menjadikan tahapan penelitian dengan metode kualitatif terlebih dahulu. Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu pada lokasi yang dijadikan sebagai tempat

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 22.

penelitian. Dari metode awal ini, peneliti dapat melihat secara langsung aktivitas dari para pengguna RTH Kalijodo selama jam operasionalnya.

Setelah mengamati secara langsung, peneliti melanjutkannya dengan melakukan wawancara mendalam yang diawali dengan melakukan survei terlebih dahulu untuk melihat gambaran umum dari karakteristik pengguna RTH Kalijodo. Metode survei sebagai metode kuantitatif digunakan sebagai suplemen yang melengkapi penelitian kualitatif yang merupakan metode utama dari penelitian ini. Survei dilakukan dengan menggunakan teknik *simple random sampling* dengan tidak menggunakan kerangka *sample* pada 20 (dua puluh) pengguna RTH Kalijodo, baik itu yang berasal dari pihak pengunjung, pedagang, maupun anggota komunitas pengguna dari ruang terbuka ini. Jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan  $N=20$  dan diambil dengan perincian dari beberapa kelompok pengguna, yaitu terdapat 17 (tujuh belas) individu yang dijadikan oleh peneliti sebagai responden dan juga informan dalam penggunaan metode penelitian kualitatif selanjutnya, yakni wawancara mendalam. Sedangkan 3 (tiga) individu sisanya peneliti jadikan sebagai responden saja.

Jumlah ini diperkaya dengan adanya wawancara yang turut dilakukan kepada pihak pengelola ruang publik Kalijodo, yakni 1 (satu) dari pihak pengelola RTH Kalijodo dan 1 (satu) dari pihak pengelola RPTRA Kalijodo. Dengan demikian, setidaknya terdapat 22 (dua puluh dua) pihak yang dijadikan oleh peneliti sebagai subjek penelitian dalam pendekatan metode campuran ini. Strategi campuran yang digunakan peneliti ini juga turut didukung dengan dokumentasi dan studi kepustakaan yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang fungsi dalam ruang terbuka hijau di perkotaan, khususnya di RTH Kalijodo.

### 1.7.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi dalam suatu permasalahan penelitian. Mereka dalam konteks ini berperan sebagai informan kunci yang memberikan berbagai informasi terkait dengan permasalahan penelitian yang diteliti dengan berdasar pada pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Adapun yang berperan sebagai subjek penelitian dalam topik ini, yaitu pengelola RTH Kalijodo, pengunjung RTH Kalijodo, pedagang RTH Kalijodo, dan juga komunitas pengguna RTH Kalijodo.

**Tabel 1.3 Karakteristik Informan**

Posisi Subjek	Nama Informan	Target Informasi
Pengelola RTH Kalijodo	Bobby (BY)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan historis Kalijodo dari masa ke masa</li> <li>2. Letak geografis Ruang Publik Kalijodo</li> <li>3. Struktur dan mekanisme koordinasi pengelola RTH Kalijodo</li> <li>4. Fungsi dan tujuan pembangunan RTH Kalijodo</li> <li>5. Fasilitas dan aksesibilitas RTH Kalijodo</li> <li>6. Waktu operasional RTH Kalijodo</li> <li>7. Kegiatan/program di RTH Kalijodo</li> <li>8. Jumlah pengguna RTH Kalijodo</li> <li>9. Saran/masukan dan harapan untuk pengembangan RTH Kalijodo</li> <li>10. Zona yang dimiliki oleh RTH Kalijodo</li> <li>11. Fasilitas yang ada pada tiap zona di RTH Kalijodo</li> <li>12. Fungsi dari tiap zona yang ada di RTH Kalijodo</li> <li>13. Mekanisme pengeloaan dan penggunaan tiap zona yang ada di RTH Kalijodo</li> </ol>
Pengelola RPTRA Kalijodo	Sarah Assifa (SA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan historis Kalijodo dari masa ke masa</li> <li>2. Letak geografis Ruang Publik Kalijodo</li> <li>3. Struktur dan mekanisme koordinasi pengelola RPTRA Kalijodo</li> <li>4. Fungsi dan tujuan pembangunan RPTRA Kalijodo</li> <li>5. Fasilitas dan aksesibilitas RPTRA Kalijodo</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kegiatan/program layanan yang ada di RPTRA Kalijodo</li> <li>7. Fungsi dari setiap fasilitas dan layanan yang dimiliki oleh RPTRA Kalijodo</li> <li>8. Waktu operasional RPTRA Kalijodo</li> <li>9. Jumlah pengguna RPTRA Kalijodo</li> <li>10. Saran/masukan dan harapan untuk pengembangan RPTRA Kalijodo</li> </ol>
Pengunjung RTH Kalijodo	Sukirman (SN), Febby (FY), Silvia (SA), Yono (YO), Munawaroh (MH), Supri (SI), Cahya (CA), Halimah (HH), Hendra (HA), Ali (AI), Sri (SR), Sinta (ST)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya pengguna RTH Kalijodo</li> <li>2. Motivasi penggunaan RTH Kalijodo</li> <li>3. Frekuensi penggunaan RTH Kalijodo</li> <li>4. Jenis aktivitas yang dilakukan di RTH Kalijodo</li> <li>5. Fungsi lain yang mungkin muncul dari keberadaan RTH Kalijodo</li> <li>6. Saran/masukan dan harapan untuk pengembangan RTH Kalijodo</li> <li>7. Mekanisme penggunaan zona yang ada di RTH Kalijodo</li> </ol>
Pedagang RTH Kalijodo	Marni (MI) dan Hasmuni (HI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya pedagang RTH Kalijodo</li> <li>2. Motivasi penggunaan RTH Kalijodo bagi pedagang</li> <li>3. Frekuensi penggunaan RTH Kalijodo bagi pedagang</li> <li>4. Kegiatan/program di RTH Kalijodo untuk pedagang</li> <li>5. Jenis aktivitas yang dilakukan di RTH Kalijodo bagi pedagang</li> <li>6. Fungsi lain yang mungkin muncul dari keberadaan RTH Kalijodo bagi pedagang</li> <li>7. Saran/masukan dan harapan untuk pengembangan RTH Kalijodo dari sudut pandang pedagang</li> <li>8. Mekanisme penggunaan zona yang ada di RTH Kalijodo oleh pedagang</li> </ol>
Komunitas Pengguna RTH Kalijodo	Yani (YI), Rizki (RI), Rahmat (RT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya anggota komunitas RTH Kalijodo</li> <li>2. Motivasi penggunaan RTH Kalijodo bagi anggota komunitas</li> <li>3. Frekuensi penggunaan RTH Kalijodo bagi anggota komunitas</li> <li>4. Kegiatan/program di RTH Kalijodo untuk anggota komunitas</li> <li>5. Jenis aktivitas yang dilakukan di RTH Kalijodo bagi anggota komunitas</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Fungsi lain yang mungkin muncul dari keberadaan RTH Kalijodo bagi anggota komunitas</li> <li>7. Saran/masukan dan harapan untuk pengembangan RTH Kalijodo dari sudut pandang anggota komunitas</li> <li>8. Mekanisme penggunaan zona yang ada di RTH Kalijodo oleh anggota komunitas</li> </ol>
--	--	---

Sumber: Hasil Temuan Penulis (2023)

### 1.7.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RTH Kalijodo, yang terletak di Jalan Bidara Raya, No. 18 RT. 04/ RW. 05, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. RTH Kalijodo menjadi lokasi studi kasus yang menarik untuk dikaji karena adanya transformasi, tidak hanya fisik, tetapi juga fungsi yang dialami oleh kawasan Kalijodo. Sejarah kompleks kontroversial yang melatarbelakanginya telah bertransformasi menjadi ruang dengan keberagaman fungsi dalam pengembangannya. Peneliti melakukan observasi dan juga wawancara mendalam secara langsung kepada para subjek penelitian yang representatif bagi penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan dalam periode waktu tertentu, yakni mulai dari bulan Agustus hingga November 2023. Dalam rentang waktu tersebut, peneliti akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang keberagaman fungsi ruang terbuka hijau di perkotaan. Melalui pemilihan lokasi dan rentang waktu yang tepat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara akurat dan menyeluruh mengenai fungsi ruang terbuka hijau di perkotaan, khususnya di RTH Kalijodo.

#### 1.7.4. Peran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data.<sup>59</sup> Peneliti menggunakan salah satu ruang publik di perkotaan sebagai sumber data dan mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Tentu penting bagi peneliti untuk dapat membangun kedekatan dengan para informan yang akan diteliti melalui interaksi langsung.

Akan tetapi, terdapat keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti ketika akan melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan. Keterbatasan ini disebabkan oleh belum adanya akses peneliti terhadap data primer yang relevan. Hal ini tentunya menjadi hambatan dalam memperoleh data yang diperlukan. Tidak terbatas pada hal tersebut, keterbatasan ini juga menjadi semakin menantang peneliti karena periode transisi pandemi *Covid-19* yang sedang dialami. Adaptasi dalam penggunaan ruang publik perkotaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

Meskipun demikian, peneliti tetap berupaya untuk memperoleh data secara menyeluruh dengan mencari sumber referensi lain melalui data sekunder yang relevan, seperti studi sebelumnya tentang RTH Kalijodo, laporan pemerintah, dan juga publikasi media lainnya yang membahas tentang ruang publik perkotaan. Peneliti juga akan berkolaborasi dengan pihak terkait, seperti pengelola RTH Kalijodo dan juga perangkat wilayah kelurahan setempat untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke data dan informan. Keterbatasan akibat masa transisi pandemi *Covid-19* yang sedang dialami, peneliti atasi dengan

---

<sup>59</sup> Hardani., dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 18.

memperluas metode pengumpulan data, yakni dengan wawancara melalui media *whatsapp messenger*. Hal ini tentu dapat menjadi alternatif bagi peneliti dalam mengumpulkan informan yang representatif pada penelitian ini,

### **1.7.5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1.7.5.1. Wawancara**

Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dengan memberikan berbagai pertanyaan yang relevan kepada informan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan menyeluruh terkait topik penelitian yang diambil.<sup>60</sup> Adapun pihak yang akan menjadi informan kunci dari penelitian akan diidentifikasi dan diseleksi terlebih dahulu oleh peneliti agar informan tersebut dapat merepresentasikan topik permasalahan yang diambil oleh peneliti. Peneliti terlebih dahulu akan membangun hubungan kedekatan dengan para informan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan terbuka agar mereka dapat merasa aman untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh peneliti sebelumnya.<sup>61</sup>

#### **1.7.5.2. Observasi**

Penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi langsung untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang

---

<sup>60</sup> Creswell. J. W, *op.cit.*, hlm. 169.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 175.

keberagaman fungsi ruang publik di perkotaan.<sup>62</sup> Observasi dilakukan dengan teknik non-partisipatif melalui ketidakterlibatan peneliti secara langsung pada kegiatan yang diamati.<sup>63</sup> Peneliti akan mengamati kegiatan dan interaksi yang terjadi di RTH Kalijodo dari luar. Observasi ini akan mencakup gambaran tentang topik penelitian, yaitu mengenai motivasi, fungsi, serta pengelolaan kawasan Kalijodo yang telah bertransformasi menjadi salah satu Ruang Terbuka Hijau di Jakarta. Dari hal ini akan terlihat keberagaman fungsi yang terjadi dalam pengembangan RTH Kalijodo. Adapun bentuk dari teknik pengumpulan data ini dapat berupa foto maupun video.

### 1.7.5.3. Survei

Dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mix method*) yang mengkombinasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif, maka teknik pengumpulan data berupa survei turut diikutsertakan sebagai suplemen untuk memperkaya data dalam penelitian ini.<sup>64</sup> Setelah sebelumnya melakukan observasi, peneliti memulai teknik wawancara mendalam dengan melakukan survei terlebih dahulu kepada para pengguna RTH Kalijodo, baik itu dari kelompok pengunjung, pedagang, maupun komunitas pengguna RTH Kalijodo. Survei yang dilakukan dengan bantuan platform *GoogleForm* ini digunakan sebagai langkah untuk

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm 167.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm 27-28.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm 168.

menggeneralisasikan gambaran umum dari karakteristik pengguna RTH Kalijodo.<sup>65</sup> Tidak terbatas pada hal tersebut, metode ini juga dilakukan untuk memperoleh pandangan mereka akan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti, yakni fungsi sosial dari suatu ruang terbuka hijau di perkotaan. Oleh karena itu, tidak heran jika kegiatan survei ini juga menjadi pembuka dari tahapan wawancara mendalam.

#### 1.7.5.4. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Dokumentasi merupakan data sekunder yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung informasi yang diberikan oleh informan kunci pada penelitian,<sup>66</sup> Dokumentasi dalam hal ini dapat berbentuk foto, catatan selama penelitian, arsip pemerintahan, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>67</sup> Dokumentasi ini akan memberikan informasi yang relevan dalam memahami keberagaman fungsi ruang terbuka hijau di perkotaan, khususnya di RTH Kalijodo.

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti tidak terbatas pada dokumentasi belaka. Peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber bacaan. Sumber tersebut dapat berupa buku digital (*e-book*), jurnal ilmiah (nasional dan internasional), tesis, dan juga media lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan studi kepustakaan peneliti dapat memperoleh pemahaman tentang konsep, teori, dan penelitian terdahulu yang

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 28.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm 279.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm 235.

telah dilakukan dalam topik ini. Hal ini tentunya untuk membangun kerangka teoritis yang kuat dalam menganalisis penelitian yang dilakukan.

#### **1.7.6. Triangulasi Data**

Triangulasi data merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian. Data ini akan digunakan sebagai pembandingan dari temuan penelitian yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam melakukan triangulasi, peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, tetapi beragam. Pada penelitian ini, proses triangulasi akan dilakukan kepada anggota Komunitas “Ayo Ke Taman”, yakni Jihan Dzahabiyah (*Partnership “Ayo Ke Taman”*) dan Akhsan (*Operational Manager “Ayo Ke Taman”*). Pandangan anggota organisasi ini menjadi penting karena dapat memudahkan bagi peneliti untuk memahami dan menganalisis keberagaman fungsi ruang terbuka hijau di perkotaan, khususnya di RTH Kalijodo. Tidak terbatas pada hal itu, evaluasi terhadap hasil temuan dan analisis peneliti, serta memberikan pandangan yang kritis dan konstruktif juga diharapkan didapatkan oleh peneliti dari proses triangulasi ini. Dengan menggabungkan sudut pandang dan pengetahuan dari berbagai sumber, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fungsi ruang terbuka hijau di perkotaan, khususnya pada RTH Kalijodo.

## 1.8. Sistematika Penulisan

Peneliti merancang sistematika penulisan dengan membaginya kepada lima bab. Sistematika ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam merinci pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun sistematika penulisan dengan pembahasan masing-masing babnya adalah sebagai berikut:

**BAB I**, pendahuluan. Pada bab ini akan diberikan gambaran umum terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti mengawali bab ini dengan menguraikan latar belakang penelitian yang membantu dalam melihat gambaran dari permasalahan penelitian yang akan diangkat. Pada bagian ini akan terlihat jika kawasan Kalijodo yang saat ini telah bertransformasi menjadi RTH tidak hanya mengalami perubahan secara fisik tetapi juga fungsi. Perubahan fungsi ini tidak hanya didasarkan pada transformasi kawasan Kalijodo dari masa ke masa, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik yang melatarbelakangi masyarakat untuk beradaptasi dalam mewujudkan fungsi yang telah diaturkan dengan kemampuan dan juga kebutuhan mereka akan pemanfaatan ruang publik itu sendiri. Hal ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan keberagaman fungsi sosial dari suatu ruang publik kota karena harus beradaptasi dengan dinamika perkembangan kemampuan dan kebutuhan masyarakat akan peruntukkan ruang yang beragam. Dari latar belakang tersebut, peneliti setidaknya menyimpulkan terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini.

Selanjutnya, bab ini juga memaparkan tentang tujuan dan manfaat penelitian dengan harapan dapat memperjelas dan mempertegas arah penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan penelitian sejenis yang turut dipaparkan dalam bab ini digunakan sebagai data pendukung dan dilengkapi dengan kerangka konseptual yang menjadi refleksi pemikiran sosiologi dalam melihat permasalahan ini. Pada bab ini juga turut dijelaskan mengenai metode

penelitian yang digunakan oleh peneliti dan sistematika penulisan dari penelitian itu sendiri.

**BAB II**, gambaran lokasi penelitian. Pada bagian ini peneliti akan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai ruang publik Kalijodo. Adapun pembahasannya terbagi ke dalam tiga elemen utama, yakni denah kawasan, sejarah, dan juga ragam ruang publik yang dimiliki oleh Kalijodo. Pembahasan ini tidak lain adalah sebagai sarana untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang transformasi perkembangan kawasan Kalijodo hingga saat ini. Dari penggambaran ini diharapkan dapat menciptakan pandangan yang lebih holistik mengenai fungsi bagi penggunaanya.

**BAB III**, hasil temuan lapangan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil temuan lapangan yang telah dilakukan di RTH Kalijodo. Gambaran umum kawasan Kalijodo dalam keberadaannya sebagai salah satu ruang terbuka hijau di perkotaan. Aspek-aspek seperti karakteristik pengguna dalam struktur sosial, mulai dari usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan juga tingkat pendidikan akan dijelaskan dalam bab ini. Tidak terbatas pada hal tersebut aspek penting lainnya seperti bagaimana eksistensi dari ruang publik ini di mata penggunaanya, frekuensi penggunaan, serta motivasi dari mereka yang memilih ruang publik ini sebagai destinasi kunjungannya, akan menjadi gambaran yang menghiasi pembahasan pertama bab ini. Pada pembahasan berikutnya, akan dijelaskan mengenai peranan dan keunggulan dari setiap zona yang dimiliki oleh RTH Kalijodo sehingga menjadikannya sebagai ruang penuh zona yang berupaya untuk memenuhi keberagaman kebutuhan para penggunaanya.

**BAB IV**, pembahasan. Pada bab ini temuan hasil di lapangan pada bab sebelumnya akan diuraikan keterkaitannya dengan teori dan konsep yang sudah dipaparkan pada kerangka konseptual, yaitu berkaitan dengan keberagaman

fungsi sosial dari RTH Kalijodo dalam perspektif struktural fungsional Robert K. Merton. Sebelum melihat implikasi dari adaptasi anomie fungsi terhadap keberagaman fungsi RTH, kita akan dijelaskan tentang bagaimana keberadaan RTH Kalijodo dalam struktur ruang kota. Selanjutnya, kita akan melihat penggambaran tentang bagaimana karakteristik yang melatarbelakangi para pengguna RTH Kalijodo mempengaruhi kemampuan mereka dalam mewujudkan fungsi yang telah diaturkan bagi suatu RTH. Keterkaitan di antara keduanya ini akan menghasilkan keadaan anomie, yang merangsang adanya adaptasi yang harus dilakukan oleh para pengguna. Setidaknya 5 tipe adaptasi Merton akan terlihat implikasinya dari pemanfaatan ruang yang akan dibahas dalam bab ini. Dari tiap adaptasi ini nantinya akan berdampak pada munculnya keberagaman fungsi sosial RTH yang terbagi atas 5 tipe fungsi pula dari pandangan Merton. Pembahasan ini menjadi lebih lengkap dengan adanya penjelasan mengenai konsekuensi dan respon yang dilakukan akan konsekuensi dari masing-masing fungsi sosial yang muncul dari adanya proses adaptasi tersebut.

**BAB V**, penutup. Pada bagian terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis pada tulisan ini, Kesimpulan sendiri didefinisikan sebagai hasil rangkuman dari awal hingga bagian akhir, sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang lebih ringkas, jelas, dan juga padat. Peneliti dalam bab ini juga turut memaparkan tentang beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian, dalam bab ini akan berisikan implikasi praktis serta teoritis dari penelitian mengenai keberagaman fungsi sosial ruang terbuka hijau di perkotaan, khususnya pada RTH Kalijodo.